

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah Subhanahuwata'ala, atas berkah dan ridha-Nya, penyusunan dokumen RPJMDesa Sriharjo 2019-2025 dapat diselesaikan dengan baik. Kerja sama yang baik dan kerja keras dari tim penyusun RPJM Desa Sriharjo, segenap Pamong Desa dan Staff, BPD, serta dukungan penuh dari segenap elemen masyarakat Desa Sriharjo menjadi modal besar bagi tersusunnya dokumen ini.

Semua proses partisipatif penyusunan RPJMDesa, mulai dari Pengkajian Keadaan Desa (PKD), Sinkronisasi dengan Program Pemerintah Kabupaten Bantul, Musyawarah Desa, Musrenbang, hingga Penetapan Perdes telah dilakukan. Masukan dan usulan masyarakat berkait masalah, potensi, dan program menjadi dasar utama dalam penyusunan program Pemerintah Desa enam tahun mendatang yang tertuang dalam RPJMDesa Sriharjo ini. Kami berharap, proses panjang yang dilakukan ini, benar-benar dapat menghasilkan dokumen RPJMDesa yang dapat digunakan sebagai acuan penyelenggaraan Pembangunan Desa Sriharjo selama enam tahun ke depan.

Ucapan terima kasih tak terhingga kami ucapkan kepada seluruh Tim Penyusun RPJMDesa Sriharjo 2019-2025, seluruh Pamong Desa Sriharjo baik Kasi, Kaur, maupun Dukuh, staff, serta Ketua dan anggota BPD yang telah bekerja bersama bahu membahu menyelesaikan naskah RPJMDesa ini. Kepada

Pemerintah Kabupaten Bantul, Ibu Camat Imogiri, Tim dari IRE Yogyakarta dan Pendamping Desa Kabupaten Bantul, ucapan terima kasih juga kami haturkan atas arahan dan pendampingannya selama proses perumusan RPJMDesa Sriharjo 2019-2025 ini. Kepada seluruh elemen masyarakat Desa Sriharjo, ucapan terima kasih tak terhingga kami sampaikan atas keterlibatan, masukan, saran, dan kritiknya, sehingga dokumen RPJMDesa ini dapat disusun dengan baik.

Sebagaimana buatan makhluk lainnya, tentu saja naskah RPJMDesa Sriharjo 2019-2025 ini masih jauh dari sempurna. Sehingga saran dan kritik dari semua pihak kami butuhkan untuk perbaikan. Apabila terdapat hal yang harus diperbaiki, ditambahkan maupun dikurangi akibat adanya keadaan/kebutuhan baru masyarakat Desa Sriharjo di kemudian hari, tetap dimungkinkan untuk dilakukan review secara terus menerus terhadap dokumen RPJMDesa Sriharjo 2019-2025 ini.

Sriharjo, 9 April 2019

Lurah Desa Sriharjo 2018-2024

Titik Istiyawatun Khasanah, S.I.P.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDesa merupakan dokumen perencanaan pembangunan Desa dalam jangka waktu enam tahun. Dokumen inilah yang hendak menjadi panduan pembangunan desa selama periode enam tahun kepemimpinan Lurah Desa. RPJMDesa memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, rencana pelaksanaan pembangunan, rencana pembinaan kemasyarakatan, dan rencana pemberdayaan masyarakat Desa.

Proses perumusan RPJMDesa dilakukan secara partisipatif. Harapannya, ketika keterlibatan/partisipasi masyarakat dalam penyusunan RPJMDesa ini tinggi, dapat menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap proses pembangunan di desa. Partisipasi aktif masyarakat yang tinggi dalam pembangunan desa akan melahirkan perasaan “ **handarbeni** “ terhadap pembangunan di desanya. Sehingga masyarakat akan pula turut bertanggung jawab terhadap hasil-hasil pembangunan yang ada. Mereka akan tergerak untuk selalu menjaga, merawat, memelihara dan melestarikannya.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 telah mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten. Lebih lanjut dijabarkan bahwa perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif oleh pemerintah desa sesuai dengan kewenangannya.

Dalam sudut pandang politik, sesungguhnya proses perencanaan pembangunan desa telah dimulai sejak Pemilihan Lurah Desa (Pilurdes). Dalam Pilurdes, rakyat menentukan pilihannya berdasarkan program-program yang ditawarkan oleh para calon. Dengan demikian, sebenarnya sejak saat itu rakyat telah menyepakati program-program yang hendak dilaksanakan oleh calon terpilih selama periode kepemimpinannya. Oleh karenanya, dapat dikatakan bahwa rencana pembangunan desa sesungguhnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari agenda-agenda yang ditawarkan oleh Lurah Desa saat berkampanye. Hanya kemudian program-program ini perlu dikonfirmasi ulang kepada seluruh rakyat melalui proses-proses dalam penyusunan RPJMDesa.

Proses penyusunan RPJM Desa Sriharjo dimulai dari tahap Pengkajian Keadaan Desa (PKD) yang melibatkan semua pihak/pemangku kepentingan secara aktif dalam proses pembahasan dan pengambilan keputusan. Pengkajian

Keadaan Desa (PKD) dilaksanakan melalui Musyawarah Pedukuhan dan Diskusi Sektoral.

Tim 11 RPJMDesa Sriharjo mendatangi dan memfasilitasi diskusi pada forum musyawarah Pedukuhan di 13 Pedukuhan yang ada. Berikutnya, tim 11 RPJMDesa mengundang berbagai elemen masyarakat sesuai sektor/bidang pembangunan yang ada untuk juga melakukan pengkajian keadaan desa(PKD) dalam forum diskusi sektoral. Tingkat partisipasi masyarakat dalam kedua forum PKD ini cukup tinggi. Banyak usulan dan pencermatan keadaan Pedukuhan maupun Desa yang disampaikan oleh para peserta. Hasil PKD melalui dua forum tersebut kemudian dikonfirmasi dalam Musyawarah Desa. Hasilnya dibawa dalam rapat-rapat dan penyusunan dokumen RPJMDesa oleh Tim 11, lalu difinalkan dalam Forum Musrenbangdes.

Berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten. Dalam prosesnya, hasil pengkajian keadaan Desa secara partisipatif yang sudah dilakukan melalui Musyawarah Pedukuhan dan Diskusi Sektoral di Desa Sriharjo, kemudian disinkronkan dengan RPJMD Kabupaten. Dengan demikian, harapannya dokumen RPJM Desa yang disusun secara partisipatif ini benar-benar dapat menjadi cerminan atas kondisi objektif Desa dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul.

Draft rancangan RPJMDesa Sriharjo disusun oleh tim 11 RPJMDesa Sriharjo. Selanjutnya didiskusikan dengan para Pamong Desa, dan terakhir dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa. Kesepakatan tentang dokumen RPJMDesa ini selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Lurah Desa dan diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang RPJMD Kab. Bantul.

1.3 Pengertian

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
11. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

13. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
14. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
18. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

19. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang syah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
21. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
22. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
23. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat,
24. Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian

dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.

25. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

26. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1.4 . Maksud dan Tujuan

Maksud

Dokumen ini disusun dengan maksud untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa Sriharjo dalam menjalankan kegiatan-kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam jangka menengah, yakni selama 6 (enam) tahun. Dalam dokumen ini, terdapat visi, misi dan program strategis Desa Sriharjo yang akan dilaksanakan oleh Lurah

Desa Sriharjo dalam menjalankan Pemerintahan Desa selama masa jabatannya.

RPJM Desa, Desa Sriharjo Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul 2019 – 2025 merupakan kelanjutan dan pembaruan dari tahap pembangunan sebelumnya. RPJM Desa diarahkan untuk memberikan fokus yang semakin tajam dan tepat guna menyelesaikan permasalahan pembangunan secara spesifik di Desa Sriharjo. Dengan adanya RPJM Desa, diharapkan akan terwujud koordinasi yang semakin baik, terciptanya Integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar pelaku pembangunan (*stakeholders*) yang ada di Desa, Kabupaten, Provinsi dan Pusat. Diharapkan pula akan terbangun keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat.

Tujuan

Tujuan Penyusunan RPJM Desa adalah :

1. Menyediakan dokumen strategis Desa mulai dari perumusan visi, misi, program strategis, strategi dan rencana tindakan yang akan dilaksanakan secara bersama-sama antara Pemerintah Desa, Organisasi Kemasyarakatan Desa, Masyarakat luas maupun berbagai pemeran pembangunan yang lain melalui kerjasama secara terpadu.
2. Memberikan pegangan dan indikator kinerja Pemerintah Desa Sriharjo dalam penyelenggaraan

pemerintahan desa sebagaimana tertuang dalam Peraturan Desa.

3. Memberikan gambaran prioritas permasalahan desa yang harus ditanggulangi dan potensi unggulan yang berpeluang untuk dikembangkan melalui serangkaian program.
4. Menyediakan dokumen usulan program strategis dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat dan diselaraskan dengan program prioritas pemerintah kabupaten.
5. Sebagai masukan bagi dinas instansi pemerintah dan berbagai pemeran pembangunan lain dalam rangka membangun kemitraan maupun investasi di Desa.

BAB II

PROFIL DESA

2.1. Kondisi Desa

Desa Sriharjo merupakan salah satu dari delapan desa yang ada di Kecamatan Imogiri. Wilayah Desa Sriharjo merupakan pertemuan antara dua sungai, yaitu Sungai Oya dan Sungai Opak. Kedua sungai tersebut merupakan batas alam desa. Masing-masing sungai berada pada sisi selatan dan barat desa yang menjadi sumber utama air irigasi pertanian.

Desa Sriharjo berada pada titik koordinat 110,3964LS/LU-7,94892 BT/BB. Luas wilayah desa Sriharjo adalah 502,36 Ha dengan jumlah penduduk 9.439 jiwa terdiri dari 3.020 KK. Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan adalah 3 km. Jarak dari pusat pemerintahan kota adalah 17 km. Jarak dari kota/kabupaten adalah 10 km. Sedangkan jarak dari ibukota provinsi adalah 17 km.

Batas wilayah Desa Sriharjo sebelah utara adalah Desa Kebonagung Kecamatan Imogiri dan Desa Mangunan Kecamatan Dlingo, batas selatan yaitu Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri, batas timur yaitu Desa Mangunan Kecamatan Imogiri, dan batas barat yaitu Desa Srihardono Kecamatan Pundong.

Tabel 1. Batas wilayah Desa Sriharjo

Arah	Batas-Batas
------	-------------

Utara	Desa Kebonagung Kecamatan Imogiri dan Desa Mangunan Kecamatan Dlingo
Timur	Desa Mangunan Kecamatan
Selatan	Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri
Barat	Desa Srihardono Kecamatan Pundong

Iklim Desa Sriharjo sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia, yaitu memiliki iklim kemarau dan penghujan. Hal tersebut berpengaruh langsung terhadap kegiatan pertanian yang ada di Desa Sriharjo.

2.2.1 Sejarah Desa

Desa Sriharjo dibentuk pada tahun 1946. Sedangkan nama 'Sriharjo' diambil dari geografi wilayah dan mata pencaharian penduduk. Menurut mitos Jawa, kata 'Sriharjo' adalah pemberian dari Dewi Sri dan 'harjo' yaitu raharjo atau sejahtera. Jadi, nama Sriharjo berarti desa yang sejahtera dengan mata pencaharian pokok warganya adalah bercocok tanam.

Desa Sriharjo awalnya penggabungan tiga kelurahan lama, yaitu:

- 1.** Kelurahan Mojohuro
- 2.** Kelurahan Dogongan
- 3.** Kelurahan Kedungmiri

Adapun cikal bakal Pamong Desa/Perangkat Desa Sriharjo adalah sebagai berikut:

- 1.** Lurah : Sosro Margono

- 2.** Carik : Wardo Sumiyarso
- 3.** Jogoboyo : Sastro Suharjono
- 4.** Sosial : Kami Rejo
- 5.** Ulu-Ulu : Sastro Sarjono
- 6.** Modin : Chundori

Kantor sementara pada waktu penggabungan bertempat di rumah Bapak Sosro Margono di Pedukuhan Mojohuro. Pada tahun 1951 dibangun kantor baru Pemerintah Desa Sriharjo di atas tanah kas desa di wilayah Pedukuhan Mojohuro.

Berikut pembagian wilayah pedukuhan Desa Sriharjo pada saat itu:

1. Pedukuhan Miri
2. Pedukuhan Jati
3. Pedukuhan Mojohuro
4. Pedukuhan Pelemadu
5. Pedukuhan Sungapan
6. Pedukuhan Gondosuli
7. Pedukuhan Trukan
8. Pedukuhan Dogongan
9. Pedukuhan Ketos
10. Pedukuhan Ngrancah
11. Pedukuhan Pengkol
12. Pedukuhan Sompok
13. Pedukuhan Wunut

Berikut daftar pejabat lurah Desa Sriharjo mulai berdirinya Desa Sriharjo:

No.	Nama	Masa Jabatan	Keterangan
1.	Sosro Margono	1946-	Lurah pertama
2.	Warto Sumiyarsono	-1987	Lurah kedua
3.	Dimun, Bc. Hk.	1988-1997	Lurah ketiga
4.	Supardijana	1999-2008	Lurah keempat
5.	Edy Gunawan	2008-2014	Lurah kelima
6.	Sukapdjo	2014-2016	Lurah keenam
7.	Titik Istiyawatun Khasanah, S.I.P.	2018-2024	Lurah ketujuh

Tabel 2. Daftar Lurah Desa Sriharjo periode Tahun 1946 s/d 2024

2.2.2 Demografi

Desa Sriharjo terdiri dari 13 Pedukuhan memiliki jumlah penduduk 9.439 jiwa terdiri dari 3.020 KK. Batas wilayah Desa Sriharjo Kecamatan Imogiri sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : berbatasan dengan Desa Kebonagung Kecamatan Imogiri dan Desa Mangunan Kecamatan Dlingo
2. Sebelah Timur: berbatasan dengan Desa Mangunan Kecamatan Dlingo
3. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri
4. Sebelah Barat : berbatasan dengan Desa Srihardono Kecamatan Pundong

Sedangkan jarak tempuh dari Desa Sriharjo menuju beberapa pusat daerah sebagai berikut:

1. Jarak tempuh ke Kecamatan : 3 km

2. Jarak tempuh ke Kabupaten : 10 km
3. Jarak tempuh ke Kota Madya : 10 km
4. Jarak tempuh ke Ibu Kota Provinsi : 17 km

Jumlah Penduduk Desa Sriharjo pada tahun 2018 adalah 9.439 jiwa terdiri dari 3.020 KK. Jumlah penduduk laki-laki 4.681 jiwa dan penduduk perempuan 4.758 jiwa. Adapun rincian tersebut sebagai berikut:

a. Jumlah Penduduk Menurut Golongan Umur

Data ini bermanfaat untuk mengetahui pertumbuhan penduduk dan mengetahui jumlah angkatan kerja yang ada. Data penduduk menurut golongan umur di Desa Sriharjo dapat dilihat pada tabel berikut:

Golongan Umur	Jumlah Penduduk	Keterangan
0 bulan - 17 tahun	2.295 jiwa	
18 - 55 tahun	4.975 jiwa	
55 tahun ke atas	2.169 jiwa	
Jumlah keseluruhan	9.439 jiwa	

Tabel 3. Data penduduk Desa Sriharjo berdasarkan golongan umur

b. Jumlah Penduduk Menurut Agama

Ditinjau dari segi agama dan kepercayaan masyarakat Desa Sriharjo mayoritas beragama islam, dengan rincian data pada tabel sebagai berikut:

Agama	Jumlah	
	Laki-Laki	Perempuan

Islam	4.747 orang	4.686 orang
Kristen	13 orang	22 orang
Khatolik	38 orang	38 orang
Hindu	-	-
Budha	-	-
Lainnya	-	-

Tabel 4. Data penduduk Desa Sriharjo berdasarkan agama yang dianut

c. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan berpengaruh pada kualitas sumberdaya manusia. Proses pembangunan desa akan berjalan dengan lancar apabila masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Akses untuk mendapatkan pendidikan jauh lebih mudah karena jarak tempat pendidikan baik tingkat SD sampai SMA dekat dengan pemukiman warga. Tetapi, apabila dilihat dari data statistik masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat merupakan suatu permasalahan yang harus segera dipecahkan terutama dalam membangun kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pendidikan. Data penduduk menurut tingkat pendidikannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tingkat Pendidikan		Jumlah Penduduk
Lulusan Pendidikan Umum	Taman Kanak-Kanak	893 orang
	Sekolah Dasar	5.279 orang
	SMP	3.246 orang
	SMA/SMK	5.477 orang
	Akademi/D1-D3	430 orang
	Sarjana	760 orang
	Pasca Sarjana	47 orang (S2) dan 7 orang (S3)
Lulusan Pendidikan Khusus	Pondok Pesantren	76 orang
	Pendidikan Keagamaan	21 orang
	Sekolah Luar Biasa	14 orang
	Kursus Ketrampilan	306 orang
Tidak Lulus dan Tidak Sekolah	Tidak Lulus	1.528 orang
	Tidak Sekolah	1.492 orang

Tabel 4. Data penduduk Desa Sriharjo berdasarkan tingkat pendidikan

d. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk di Desa Sriharjo sebagian besar masih berada di sektor pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memegang peranan penting dalam bidang ekonomi masyarakat.

Data menurut mata pencaharian penduduk dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No.	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk	Keterangan
1.	PNS	142 orang	
2.	TNI/Polri	56 orang	
3.	Swasta	957 orang	
4.	Wiraswasta/Pedagang	834 orang	
5.	Petani	821 orang	
6.	Tukang	353 orang	
7.	Buruh Tani	765 orang	
8.	Pensiunan	74 orang	
9.	Peternak	280 orang	
10.	Jasa	291 orang	
11.	Pengrajin	38 orang	
12.	Pekerja Seni	10 orang	
13.	Lainnya	2.054 orang	
14.	Tidak Bekerja	575 orang	

Tabel 5. Data penduduk Desa Sriharjo berdasarkan mata pencaharian

2.2.3 Keadaan Sosial

Mayoritas mata pencarian penduduk Desa Sriharjo bergerak dibidang pertanian. Permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan mata pencaharian penduduk adalah terbatasnya lapangan pekerjaan yang sesuai dengan tingkat perkembangan penduduk sebagaimana tertuang dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bantul. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pembangunan desa adalah melakukan usaha

perluasan kesempatan kerja dengan melakukan penguatan modal dan fasilitasi sebagai modal untuk pengembangan usaha khususnya di ekonomi produktif.

Angka kemiskinan Desa Sriharjo yang masih tinggi menjadikan Desa Sriharjo harus mencari peluang lain yang dapat menunjang peningkatan taraf ekonomi masyarakat. Banyaknya kegiatan Ormas di Desa Sriharjo seperti RT, LPMD, PKK, Karang Taruna, Remaja Masjid, Jamiyah Yasin, Posyandu, Kelompok Arisan, Kelompok Tani, Dan Kelompok Ternak merupakan aset desa yang bermanfaat untuk dijadikan media penyampaian informasi dalam setiap proses pembangunan desa pada masyarakat. Berikut uraian jumlah penduduk menurut kriteria kesejahteraan keluarga:

No.	Kategori	Jumlah (KK)
1.	Sejahtera	404
2.	Pra-sejahtera 1	885
3.	Pra-sejahtera 2	780
4.	Kurang mampu	509

Tabel 6. Data penduduk Desa Sriharjo berdasarkan tingkat kesejahteraan

Berikut tabel jumlah penduduk menurut tenaga kerja:

No.	Kriteria Penduduk	Jumlah
1.	Usia 18-56 tahun yang sudah bekerja	8.846 orang
2.	Usia 18-56 yang tidak bekerja	575 orang

Tabel 7. Data penduduk Desa Sriharjo berdasarkan usia produktif

2.2.4 Keadaan Ekonomi

Tingkat kesejahteraan penduduk Desa Sriharjo terbagi menjadi kategori, yakni sejahtera, pra-sejahtera 1, pra-sejahtera

2, dan kurang mampu. Berikut data tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Sriharjo berdasarkan pembagian wilayah pedukuhan:

No	Pedukuhan	Tingkat Keluarga Sejahtera				Jumlah
		Sejahtera	Pra- Sejahtera 1	Pra- Sejahtera 2	Miskin	
1.	Miri	64	62	81	39	246
2.	Mojohuro	-	-	-	35	35
3.	Jati	12	122	91	77	311
4.	Pelemadu	62	135	102	46	345
5.	Sungapan	56	61	25	17	159
6.	Gondosuli	47	29	50	28	154
7.	Trukan	4	96	60	30	190
8.	Dogongan	71	30	28	16	145
9.	Ketos	-	5	94	63	162
10.	Ngrancah	35	77	26	25	163
11.	Pengkol	18	20	29	31	98
12.	Sompok	2	142	75	50	269
13.	Wunut	4	46	71	52	176
Jumlah		384	825	735	509	2.453
Presentase (%)		15,65%	3,49%	30,18%	20,75%	

Tabel 8. Data penduduk Desa Sriharjo berdasarkan pembagian wilayah

Desa Sriharjo memiliki beberapa kelembagaan sosial dengan berbagai macam bidang kegiatan. Berbagai organisasi sosial diantaranya adalah LPMD dengan 13 POKGIAT LPMD di tingkat Pedukuhan, PKK, Karang Taruna, GAPOKTAN terdiri 13 Kelompok Tani, 13 Kelompok Ternak, 7 Kelompok Pertanian, dan Kelompok Wanita Tani. Dalam hal pengairan, terdapat 4 blok kelompok Petani Pengguna Air (P3A). Keempat P3A tersebut bergabung dalam Gabungan Petani Pengguna Air (GP3A) Desa Sriharjo. Selain itu, terdapat koperasi simpan pinjam yang bertujuan untuk meningkatkan usaha keluarga maupun tujuan kepetinga sosial

ekonomi masyarakat.

2.2. Kondisi Pemerintahan Desa

2.2.1 Pembagian Wilayah Desa

Wilayah Desa Sriharjo dengan luas 502,36 Ha terbagi menjadi 13 pedukuhan, Pedukuhan Miri, (2) Pedukuhan Mojohuro, (3) Pedukuhan Pelemadu, (4) Pedukuhan Sungapan, (5) Pedukuhan Gondosuli, (6) Pedukuhan Trukan, (7) Pedukuhan Dogongan, (8) Pedukuhan Ketos, (9) Pedukuhan Ngrancah, (10) Pedukuhan Pengkol, (11) Pedukuhan Sompok, (12) Pedukuhan Wunut, dan (13) Pedukuhan Jati.

Berikut nama-nama Dukuh Se-Desa Sriharjo sampai dengan Maret 2019:

NO	NAMA	PEDUKUHAN
1.	Basharudin	Dukuh Miri
2.	Bambang Rinadi	Dukuh Jati
3.	Sulistyo Prihatmadi	Dukuh Mojohuro
4.	Sumarji	Dukuh Pelemadu
5.	Warsono	Dukuh Sungapan
6.	Muryadi	Dukuh Gondosuli
7.	Budi Sariyanto	Dukuh Dogongan
8.	Andri Priyanto	Dukuh Trukan
9.	Samsuri	Dukuh Ketos
10.	Jumad	Dukuh Ngrancah
11	Hardono	Dukuh Pengkol (PJ)
12	Hardono	Dukuh Sompok
13	Sugiyanto	Dukuh Wunut

Selain terbagi dalam Pedukuhan, wilayah Pedukuhan di Desa Sriharjo terdiri dari RT-RT. Terdapat 63 RT di seluruh Desa Sriharjo. Berikut nama-nama Ketua RT se- Desa Sriharjo.

No	Pedukuhan	Nama	Jabatan
1	Miri	Hadi Susianto	Ketua RT 01
2	Miri	Dalimun	Ketua RT 02
3	Miri	Jumanto	Ketua RT 03
4	Miri	Jilan	Ketua RT 04
5	Miri	Dalijo	Ketua RT 05
6	Jati	Santoso	Ketua RT 01
7	Jati	Tusiyanto	Ketua RT 02
8	Jati	Sugiman	Ketua RT 03
9	Jati	Tukija	Ketua RT 04
10	Jati	Sugeng	Ketua RT 05
11	Jati	Widayat	Ketua RT 06
12	Jati	Juremi	Ketua RT 07
13	Mojohuro	Catur Wiranto	Ketua RT 01
14	Mojohuro	Sarimin	Ketua RT 02
15	Mojohuro	Suwarno	Ketua RT 03
16	Mojohuro	Supriyanto	Ketua RT 04
17	Mojohuro	Agus Rohmad	Ketua RT 05
18	Mojohuro	Supardi	Ketua RT 06
19	Pelemadu	Edhi Haryanto	Ketua RT 01
20	Pelemadu	Agus Salim Shidiq	Ketua RT 02
21	Pelemadu	Suhartoyo	Ketua RT 03
22	Pelemadu	Sigit Suwasana	Ketua RT 04
23	Pelemadu	Miyanto	Ketua RT 05
24	Pelemadu	Ngadiman	Ketua RT 06
25	Sungapan	Suradi Nurohman	Ketua RT 01
26	Sungapan	Parjiyono	Ketua RT 02
27	Sungapan	Satari	Ketua RT 03
28	Sungapan	Gimin	Ketua RT 04
29	Gondosuli	Parinem	Ketua RT 01
30	Gondosuli	Suranto	Ketua RT 02
31	Gondosuli	Suryadi	Ketua RT 03
32	Gondosuli	Sarjana	Ketua RT 04
33	Trukan	Sugeng Riyanto	Ketua RT 01
34	Trukan	Sudiman	Ketua RT 02
35	Trukan	Nurhadi	Ketua RT 03
36	Trukan	Muji Sapari	Ketua RT 04
37	Dogongan	Sukardi	Ketua RT 01
38	Dogongan	Suopardal	Ketua RT 02
39	Dogongan	Maryanto	Ketua RT 03
40	Ketos	Ponidi	Ketua RT 01
41	Ketos	Sunarjo	Ketua RT 02
42	Ketos	Salim Iklim	Ketua RT 03
43	Ketos	Dimun Dedy	Ketua RT 04

44	Ngrancah	Paijan	Ketua RT 01
45	Ngrancah	Pangaji	Ketua RT 02
46	Ngrancah	Ahmadi	Ketua RT 03
47	Ngrancah	Teguh Rahayu	Ketua RT 04
48	Pengkol	Turmudzi	Ketua RT 01
49	Pengkol	Sukemi	Ketua RT 02
50	Pengkol	Sukirno	Ketua RT 03
51	Sompok	Mulyana	Ketua RT 01
52	Sompok	Sutrisno	Ketua RT 02
53	Sompok	Paimun	Ketua RT 03
54	Sompok	Sakip	Ketua RT 04
55	Sompok	Sarju	Ketua RT 05
56	Sompok	Ponidin	Ketua RT 06
57	Sompok	Sakijo	Ketua RT 07
58	Wunut	Sukijo	Ketua RT 01
59	Wunut	Ngatijan	Ketua RT 02
60	Wunut	Ngadiyo	Ketua RT 03
61	Wunut	Sokijan	Ketua RT 04
62	Wunut	Juradi	Ketua RT 05
63	Wunut	Subandi	Ketua RT 06

Sebagaimana dipaparkan dalam UU No. 06 tahun 2014 bahwa di dalam Desa terdapat tiga kategori kelembagaan desa yang memiliki peranan dalam tata kelola desa, yaitu: Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat desa (pemerintahan desa) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintahan desa mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di negeri ini.

Pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lurah desa dan pamong desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Lurah desa mempunyai tugas

menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Perangkat desa yang selanjutnya disebut pamong desa adalah unsur dalam Pemerintahan Desa yang bertugas membantu lurah desa. Meliputi sekretariat desa, pelaksana teknis, dan pelaksana kewilayahan.

Sekretariat Desa bertugas membantu lurah desa dalam bidang administratif desa yang dipimpin oleh carik desa dan terbagi dalam 3 urusan, yaitu urusan keuangan, urusan perencanaan dan urusan tata usaha dan umum. Pelaksana teknis terdiri dari tiga seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, dan seksi pelayanan.

Perangkat Desa menurut jenis jabatannya di Desa Sriharjo terdiri dari Lurah Desa, Sekretaris Desa (Carik), Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, Kaur Tata Usaha dan Umum, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Kesejahteraan, Kepala Seksi Pelayanan, Kepala Seksi Perencanaan dan 13 Dukuh

Selanjutnya untuk pelaksana kewilayahan terdiri dari 13 pedukuhan yang dipimpin oleh 13 Dukuh, yaitu (1) Pedukuhan Miri, (2) Pedukuhan Jati, (3) Pedukuhan Mojohuro, (4) Pedukuhan Pelemadu, (5) Pedukuhan Sungapan, (6) Pedukuhan Gondosuli, (7) Pedukuhan Trukan, (8) Pedukuhan Dogongan, (9) Pedukuhan Ketos, (10) Pedukuhan Ngrancah, (11) Pedukuhan Pengkol, (12) Pedukuhan Sompok, dan (13) Pedukuhan Wunut.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan

desa. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. BPD berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Daftar Nama Pejabat Pemerintahan Desa Sriharjo

No	Nama	Jabatan
-----------	-------------	----------------

1.	Titik Istiyawatun Khasanah, S.I.P.	Lurah Desa
2.	Kuswoyo	Sekretaris Desa / Carik
3.	Ismiyati	Kaur Keuangan
4.	Wahyudi	Kaur Tata Usaha dan Umum
5.	Sudarsono	Kaur Perencanaan
6.	Sandung	Kasie Pemerintahan
7.	Gotro Raharjo, S.Si.	Kasie Kesejahteraan
8.	Drs. H. As'ari	Kasie Pelayanan
9.	Basharudin	Dukuh Miri
10.	Bambang Rinadi	Dukuh Jati
11.	Sulistyo Prihatmadi	Dukuh Mojohuro
12.	Sumarji	Dukuh Pelemadu
13.	Warsono	Dukuh Sungapan
14.	Muryadi	Dukuh Gondosuli
15.	Budi Sariyanto	Dukuh Dogongan
16.	Andri Priyanto	Dukuh Trukan
17.	Samsuri	Dukuh Ketos
18.	Jumad	Dukuh Ngrancah
19.	Hardono	Dukuh Pengkol (PJ)
20.	Hardono	Dukuh Sompok
21.	Sugiyanto	Dukuh Wunut

Tabel 10. Daftar nama pejabat pemerintah Desa Sriharjo

Daftar Nama Tenaga Honorer Pemerintah Desa Sriharjo

No	Nama
1	Muhammad Nur Kholis
2	Tiwik Lisnawati
3	Ikhwan Dwi Ashari
4	Nur Hidayat
5.	Yudha Wahyu Herwanto

Tabel 11. Daftar tenaga honorer lingkungan Pemerintah Desa Sriharjo

Daftar Nama Badan Permusyawaratan Desa Sriharjo

No	Nama	Dapil	Jabatan
1	Eko Priyono, A.Md.	Dusun Ketos, Ngrancah, dan Pengkol	
2	Sariyanto	Dusun Sompok dan Wunut	
3	TutikNuryati	Perwakilan Perempuan	
4	Ari Sumaryanto	Dusun Miri dan Jati	
5	Jumanto	Dusun Mojohuro dan Gondosuli	
6	Resmi Asih	Dusun Dogongan dan Trukan	
7	Agus Sabar Narimanto	Dusun Pelemadu dan Sungapan	

Tabel 12. Daftar nama pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sriharjo

Organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa

Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam melakukan upaya pemberdayaan

masyarakat. Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat desa. Pembentukan lembaga kemasyarakatan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dengan pemerintahan desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif. Terdapat beberapa LKD di Desa Sriharjo, diantaranya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB).

a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)

Daftar Nama Pengurus LPMD Desa Sriharjo

No	Nama	Jabatan
1	Suwandi	Ketua 1
2	Sumardji, BA	Ketua 2
3	Thohir, M.Si	Sekretaris
4	Sugiyono, S.Pd	Sekretaris
5	Sumiyati, S.IP	Bendahara
6	Wakidi	Bendahara
7	Sukisno	Seksi Fisik
8	Raharjo	Seksi Fisik
9	Suranto	Seksi Fisik
10	Surawi, SS	Seksi Fisik
11	Sujanto	Seksi Ekonomi
12	Tukiyat	Seksi Ekonomi
13	Sarjono	Seksi Ekonomi
14	M. Supardijana	Seksi Pendidikan
15	Subiyah, S.Pd	Seksi Pendidikan
16	Sudarto	Seksi Sosial dan Budaya
17	Ngatijan	Seksi Sosial dan Budaya
18	Tukijan	Seksi Sosial dan Budaya
19	Andri Priyanto	Seksi Sosial dan Budaya
20	Ibnu Hawanto, S. Pd	Seksi Pemuda dan Olahraga

21	Sukimin	Seksi Pemuda dan Olahraga
22	Widayat	Seksi Pemuda dan Olahraga
23	Purwoko, S.Pd	Seksi Pemuda dan Olahraga
24	Panggih Subiyono, S.Pd	Seksi Agama
25	Surisman	Seksi Agama
26	Sawaldi	Seksi Agama
27	Syamsir	Seksi Agama
28	Supriyono	Seksi Kesehatan
29	Bambang Haryono	Seksi Kesehatan
30	Juwanto	Seksi Kamtibmas
31	Suradi	Seksi Kamtibmas
32	Gandung Suwartono	Seksi Kamtibmas
33	Suhardi	Seksi Kamtibmas
34	Yutik Nuryati	Seksi Pemberdayaan Perempuan
35	Murtinah	Seksi Pemberdayaan Perempuan

Tabel 13. Daftar nama pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)

b. PKK

Daftar Nama Pengurus PKK Desa Sriharjo

No	Nama	Jabatan
1	Rokhiyatun Susilowati, SIP	Ketua
2	Subiyah, S.Pd	Wakil Ketua
3	Samisih, S.Pd	Wakil Ketua
4	Sumiyati, SIP	Wakil Ketua
5	Purwanti	Wakil Ketua
6	Murtinah	Sekretaris
7	Woro Dwiningsih, SP	Sekretaris
8	Dra. Suyatmi	Bendahara
9	Ermy Kristindyah F.	Bendahara
10	Siti Subiyati, S.Pd	Pokja I
11	Mahmudatul Khasanah, S.Pd	Pokja I
12	Juwariyah	Pokja I
13	Surati	Pokja I
14	Lili Wakhidah, S.Ag	Pokja I
15	Ismiyati	Pokja I
16	Siti romdonah	Pokja I
17	Mujiyatun	Pokja II
18	Dwi Setyaningsih	Pokja II
19	Kurniasih Mei Pratiwi, S.Pd	Pokja II

20	Tutik Nuryati	Pokja II
21	Dra. Roes Suryani	Pokja II
22	Wasis Puji Mulyati, S.Sos	Pokja II
23	Sukarsih	Pokja II
24	Bety Hadi Soewarno	Pokja III
25	Wahzuni	Pokja III
26	Suhesni	Pokja III
27	Mulyani	Pokja III
28	Sri Rismiyati	Pokja III
29	Lilis Sutrisni	Pokja III
30	Puji Astuti Handayani, S.Pd	Pokja IV
31	Asih Wahyuni	Pokja IV
32	Ari Suryati, S.Pd	Pokja IV
33	Bayuwati, S.Pd	Pokja IV
34	Puryani	Pokja IV
35	Winarti	Pokja IV
36	Heni Sukismi	Pokja IV

Tabel 14. Daftar nama pengurus PKK Desa Sriharjo

c. Karang Taruna

Daftar Nama Pengurus Karang Taruna 'Sedyo Bhakti' Desa Sriharjo

No	Nama	Jabatan
1.	Anton	Ketua 1
2.	Tri Hartanto	Ketua 2
3.	Gagang Mizan Yunus	Ketua 3
4.	Ning Arum Fitriana	Sekretaris 1
5.	Indarti	Sekretaris 2
6.	Ahmad N Fahmi	Bendahara 1
7.	Eko Kurniawan	Bendahara 2
8.	Zayid Albustomi	Divisi Sosial dan Agama
9.	Haristya Miftah M	Divisi Sosial dan Agama
10.	Febrianto prabowo	Divisi Sosial dan Agama
11.	Naryo	Divisi Kaderisasi
12.	Fauzan budi Raharjo	Divisi Kaderisasi
13.	Ikhwan Dwi Ashari	Divisi Kaderisasi
14.	Supriyanto	Divisi Kaderisasi
15.	Wahid Wijaya	Divisi Publikasi dan Dokumentasi

16.	M. Pramono A.	Divisi Publikasi dan Dokumentasi
17.	Bambang Wicaksono	Divisi Olahraga dan Seni Budaya
18.	Yulianto	Divisi Olahraga dan Seni Budaya
19.	Danang Apriyanto	Divisi Olahraga dan Seni Budaya
20.	Agus Purwanto	Divisi Olahraga dan Seni Budaya
21.	Ari Sumariyanto	Divisi Humas
22.	Iswanto	Divisi Humas
23.	Bayu Nugroho	Divisi Hukum dan Infokom
24.	Heri Purwantara	Divisi Hukum dan Infokom
25.	Prasuta Nanda Andhika	Divisi Hukum dan Infokom
26.	Basuki rohman	Divisi Pemberdayaan Perempuan
27.	Rossi Indria Wuri	Divisi Pemberdayaan Perempuan
28.	Yesi Erlindasari	Divisi Pemberdayaan Perempuan
29.	Septi Wulandari	Divisi Pemberdayaan Perempuan

Tabel 15. Daftar pengurus Karang Taruna Sedyo Bhakti Desa Sriharjo

BAB III

PROSES PENYUSUNAN RPJM Desa

3.1 Sosialisasi dan Konsolidasi Tim

Proses penyusunan RPJMDesa Sriharjo dimulai setelah Lurah Desa Sriharjo dilantik yaitu pada tanggal 21 November 2019. Lurah Desa Sriharjo membentuk Tim Penyusun RPJM Desa dengan menetapkan Keputusan Lurah Desa Sriharjo Nomor 34 Tahun 2019.

Setelah resmi terbentuk, Tim Penyusun RPJM Desa Sriharjo melakukan konsolidasi awal. Didampingi IRE Yogyakarta dan Pendamping Desa Kabupaten Bantul, Tim Penyusun RPJMDesa melaksanakan berbagai rangkaian proses penyusunan RPJMDesa. Kerja tim diawali dengan menyamakan persepsi penyusunan RPJMDesa, selanjutnya segera melakukan Pengkajian Keadaan Desa (PKD) yang dilakukan secara partisipatif, yakni melalui Musyawarah Dusun (Musdus) dan Diskusi Sektoral tingkat desa. Dari kegiatan ini tim penyusun berhasil memperoleh data dan informasi.

Sebelum proses PKD dilakukan, Pemerintah Desa Sriharjo mensosialisasikan diselenggarakannya proses penyusunan RPJMDesa 2019-2025 melalui berbagai forum pertemuan warga yang ada. Seperti pertemuan RT,

Pertemuan PKK, Pertemuan Gapoktan, dan pertemuan warga lainnya.

3.2 Musyawarah

3.2.1 Musyawarah Dusun

Penyusunan RPJM Desa dimulai dari Pengkajian Keadaan Desa. Dalam proses ini, Tim RPJMDesa Sriharjo memfasilitasi masyarakat untuk menggali dan menganalisis masalah dan potensi yang ada di Desa Sriharjo. Proses mengkaji masalah dan potensi yang ada di Desa Sriharjo ini menggunakan alat :

1. Sketsa Desa;
2. Kalender Musim; dan
3. Diagram Kelembagaan.

Proses Pengkajian Keadaan Desa (PKD) melalui Musyawarah Dusun yang dilakukan pada :

No	Dusun/Pedukuhan	Pelaksanaan
1	Miri	21 Januari 2019
2	Jati	21 Januari 2019
3	Mojohuro	21 Januari 2019
4	Pelemadu	22 Januari 2019
5	Sungapan	22 Januari 2019
6	Gondosuli	22 Januari 2019
7	Trukan	23 Januari 2019
8	Dogongan	23 Januari 2019
9	Ketos	23 Januari 2019
10	Ngrancah	25 Januari 2019
11	Pengkol	25 Januari 2019
12	Sompok	26 Januari 2019

13	Wunut	26 Januari 2019
----	-------	-----------------

3.2.2 Diskusi Sektoral

Untuk melengkapi proses penggalian dan analisis masalah dan potensi dari Pedukuhan diadakan diskusi sektoral tingkat desa. Dalam diskusi ini, Tim Penyusun RPJMDesa mengundang perwakilan masyarakat di seluruh wilayah Sriharjo dari berbagai sector. Yakni sector pertanian, peternakan, perikanan, perempuan, disabilitas, anak, olah raga, seni budaya, kesehatan, pendidikan, keagamaan, dan UMKM.

Peserta dari beberapa lintas sektor melakukan diskusi berdasarkan sector issue masing-masing, dengan dipandu oleh Tim RPJMDesa. Setiap kelompok sektoral ini melakukan pengkajian keadaan desa dari sector masing-masing. Menggali dan menganalisis potensi dan masalah sesuai pada bidang issue sektoral yang ada dilakukan secara mendalam pada proses diskusi sektoral ini.

3.2.3 Musyawarah Desa

Hasil Pengkajian Keadaan Desa melalui Musdus dan diskusi sektoral selanjutnya oleh Tim Penyusun diinput dalam matrik RPJM Desa. Maytriks tersebut kemudian dikonfirmasi kembali kepada perwakilan warga melalui Musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD. Peserta Musyawarah Desa tersebut terdiri dari unsur Pemerintah Desa, Lembaga

Kemasyarakatan Desa dan Unsur Masyarakat lintas sektor.

3.2.4 Musrenbang RPJMDesa

Hasil konfirmasi hasil Pengkajian Keadaan Desa melalui Musyawarah Desa selanjutnya dibawa dalam rapat-rapat pembahasan Tim Penyusun RPJM Desa. Tim memperbaiki matriks kegiatan yang ada berdasarkan masukan masyarakat dalam Musyawarah Desa tersebut.

Berikutnya, Tim RPJMDesa menyusun draft naskah RPJMDesa. Draft tersebut kemudian dibahas dalam rapat dengan Pamong Desa dan BPD, dan selanjutnya disampaikan kepada masyarakat melalui Musrenbang RPJMDesa untuk mendapatkan masukan akhir. Masukan tersebut dibawa oleh tim untuk memperbaiki draft naskah yang ada, untuk selanjutnya ditetapkan dalam payung Peraturan Desa (Perdes) RPJM Desa Sriharjo 2019-2025.

BAB IV

POTENSI DAN RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

4.1 POTENSI

Desa Sriharjo sebenarnya memiliki banyak potensi, baik potensi Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM), maupun kelembagaan. Potensi di berbagai sektor kehidupan juga bisa dikatakan besar. Potensi tersebut berada di setiap pedukuhan di Desa Sriharjo. Sampai saat ini potensi sumber daya yang ada belum dapat dikelola secara optimal. Sehingga menimbulkan beberapa masalah yang perlu segera diselesaikan.

Pada sektor pertanian, potensi lahan yang luas dan tanah yang subur, didukung oleh petani yang berpengalaman menjadi modal besar dalam upaya meraih ketahanan dan kedaulatan pangan di Desa Sriharjo. Secara kelembagaan, di semua Pedukuhan terdapat Kelompok tani. Dalam skala Desa, kelompok tani tersebut dipayungi oleh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).

Dalam hal irigasi, terdapat pula kelompok Petani Pengguna Air (P3A), dan dalam skala Desa tergabung dalam Gabungan P3A (GP3A). Kelompok Petani perempuan terpayungi oleh Kelompok Wanita Tani (KWT), dan Pemuda petani tergabung dalam Taruna Tani. Saat ini, kelembagaan pertanian tersebut masih terus berjalan.

Berikut potensi sumber daya alam –pertanian- yang dimiliki Desa Sriharjo

No	Sumber Daya Alam yang dimiliki	Jumlah
1	Luas tanah sawah	80.197 Ha
2	Luas tanah kering	1.648 Ha
3	Luas tanah perkebunan	99 Ha
4	Sawah irigasi teknis	80.000 Ha
5	Sawah irigasi ½ teknis	98 Ha
6	Sawah tadah hujan	99 Ha
7	Tegal/ladang	543 Ha
8	Pemukiman	675 Ha
9	Pekarangan	430 Ha

Tabel 18. Data Potensi Sumber Daya Alam (SDA) Desa Sriharjo

Dalam sektor peternakan, banyak warga Desa Sriharjo yang memiliki ternak, mulai dari ayam, kambing, sampai dengan sapi. Di hampir semua pedukuhan, para peternak sapi dan/atau kambing telah memiliki kelompok, yang lazim disebut sebagai kelompok kandang. Mereka rata-rata telah memiliki kandang kelompok. Di sektor perikanan, di beberapa pedukuhan telah terdapat kelompok perikanan yang telah mulai berjalan.

Pada sektor ekonomi, potensi ekonomi kreatif maupun UMKM di Desa Sriharjo sangat besar. Usaha ekonomi kreatif mulai dari olahan pangan, mebel, hingga kerajinan banyak bermunculan. Banyak diantara UMKM tersebut yang telah memiliki ijin usaha (IUMK). Sentra industri rempeyek Pelemadu misalnya, sudah berkembang sejak beberapa tahun silam. Potensi kerajinan seperti rajut, cincin batok kelapa, kerajinan kulit sampai dengan perak pun ada di Desa Sriharjo. Dalam hal pemasaran, anak-anak muda di Desa Sriharjo telah pula memiliki kemampuan pemasaran secara online, dan mereka telah mulai bergerak menjalankan model pemasaran online tersebut. Usaha mikro ini berpotensi mengentaskan kemiskinan di Desa Sriharjo. Ketika

usaha ekonomi mikro ini semakin berkembang, maka lapangan pekerjaan menjadi semakin terbuka luas.

Berikut potensi Sumber Daya Manusia di Desa Sriharjo yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi desa:

No	Sumber Daya Manusia	Jumlah
1	Penduduk dan Keluarga	
	a. Jumlah penduduk laki-laki	5.047 orang
	b. Jumlah penduduk perempuan	5.361 orang
	c. Jumlah KK	3.020 KK
2	Mata Pencaharian Penduduk	
	PNS	142 orang
	TNI/Polri	56 orang
	Swasta	957 orang
	Wiraswasta/Pedagang	834 orang
	Petani	821 orang
	Tukang	353 orang
	Buruh Tani	765 orang
	Pensiunan	74 orang
	Peternak	280 orang
	Jasa	291 orang
	Pengrajin	38 orang
	Pekerja Seni	10 orang
	Lainnya	2.054 orang
	Tidak Bekerja	575 orang
3	Tenaga kerja berdasarkan latar belakang pendidikan	
	Sekolah Dasar	5.279 orang
	SMP	3.246 orang
	SMA/SMK	5.477 orang
	Akademi/D1-D3	430 orang
	Sarjana	760 orang
	Pasca Sarjana	47 orang (S2) dan 7 orang (S3)
	Pondok Pesantren	76 orang
	Pendidikan Keagamaan	21 orang
	Kursus Ketrampilan	306 orang

Tabel Data UMKM

No	Pedukuhan	Usaha Mikro
1	Miri	Bakso Tusuk, ASI Booster
2	Jati	Pengrajin Batik, rajut, kerajinan kulit, kerajinan batu
3	Mojohuro	Pengrajin tas, dompet
4	Pelemadu	Peyek, konveksi
5	Sungapan	Keripik Sagu, rajut, kerajinan peci
6	Gondosuli	Kerupuk
7	Trukan	Pisang mentah, arang
8	Dogongan	Tahu, Penjahit, tatah sungging wayang, batuanisan
9	Ketos	Sablon, jamu, olahan pangan (macaroni), mebel kayu
10	Ngrancah	Pengrajin Tempe, keris
11	Pengkol	Pengrajin tempe
12	Sompok	Pengrajin Perak, Cincin batok kelapa, tempe koro
13	Wunut	Batu akik, tempe koro

Pada sektor seni dan budaya, hampir setiap pedukuhan memiliki potensi seni budaya dan memiliki ragam yang berbeda, mulai dari karawitan, jathilan, shalawatan/hadroh, gejog lesung, sampai dengan wayang kulit. Dari sisi kelembagaan, kesenian tradisional di setiap Pedukuhan telah terpayungi oleh kelompok-kelompok kesenian. Hanya memang, belum semua kelompok kesenian yang ada terdaftar secara resmi pada Dinas Kebudayaan.

NO	JENIS SENI BUDAYA	PEDUKUHAN
1	Karawitan	Jati, Mojohuro, Butuh, Pelemadu, Gondosuli, Ketos, Ngrancah (SD), Wunut
2	Tari	Miri, Sungapan, Trukan
3	Jathilan	Mojohuro, Pelemadu, Sungapan, Gondosuli, Trukan, Ketos, Sompok

4	Reog	Demi Jati
5	Kethoprak	Jati, Ketos, Wunut
6	Wayang/ Pedalangan	Jati, Sompok
7	Shalawatan/ hadroh	Jati, Miri, Pelemadu, Sungapan, Gondosuli, Butuuh Trukan, Dogongan, Pengkol, Sompok, wunut
8	Ronda theglog	Wunut
9	Gejog lesung	Jati, Wunut, Miri, Pelemadu, Mojohuro, Gondosuli, Dogongan, Sompok
10	Tatah sungging	Dogongan, Wunut
11	Kriya	Mangoonstone Jati, Idnehcraft batok kelapa Sompok, kinari handcrafted demi jati, batik butuh trukan, Segoro Silver Sompok

Pada sektor pariwisata, Desa Sriharjo memiliki potensi yang besar, baik itu potensi wisata alam, wisata budaya dan religi maupun wisata pendidikan. Wilayah Sriharjo, baik di sisi barat maupun sisi timur (terutama) memiliki potensi wisata alam yang besar, mulai dari pemandangan alam (sawah, gunung, bukit, air terjun) hingga wisata air (sungai). Potensi wisata pendidikan dimiliki pula oleh Desa Sriharjo, seperti edukasi pertanian dan peternakan, juga edukasi olahan pangan (pembuatan rempeyek dan kerupuk).

Berikutnya, dalam melaksanakan pembangunan dan melakukan pemberdayaan masyarakat serta mengatasi berbagai persoalan yang ada di desa, dibutuhkan aset ataupun sarana

prasarana desa yang memadai. Berikut sarana prasarana desa ataupun aset desa yang dimiliki oleh Desa Sriharjo.

No	Jenis Prasarana	Jumlah	
1.	<i>Kantor Desa</i>	1	
2.	<i>Prasarana Kesehatan</i>	<i>Puskesmas</i>	1
		<i>Poskesdes</i>	0
		<i>UKBM (Posyandu/Polindes)</i>	14
3.	<i>Prasarana Pendidikan</i>	<i>Perpustakaan Desa</i>	1
		<i>Gedung PAUD</i>	26
		<i>Gedung TK</i>	7
		<i>Gedung SD</i>	4
		<i>Gedung SMP</i>	1
		<i>Gedung SMA</i>	0
		<i>Gedung Perguruan Tinggi</i>	0
		<i>SLB</i>	1
4.	<i>Prasarana Ibadah</i>	<i>Masjid</i>	17
		<i>Mushola</i>	19
		<i>Gereja</i>	1
		<i>Pura</i>	0
		<i>Wihara</i>	0
		<i>Klenteng</i>	0
5.	<i>Prasarana Umum</i>	<i>Gedung Olahraga</i>	14
		<i>Kesenian/budaya</i>	13
		<i>Balai pertemuan</i>	13
		<i>Sumur desa</i>	111 (pompa) 1240 (gali)
		<i>Pasar desa</i>	1
		<i>Lainnya</i>	16
6.	<i>Prasarana Transportasi</i>	<i>Jalan Desa (aspal)</i>	12 km
		<i>Jalan Kabupaten (aspal)</i>	6 km
		<i>Jala Provinsi (aspal)</i>	10 km
7.	<i>Prasarana Air Bersih</i>	<i>Hidran Umum</i>	-
		<i>Penampung Air Bersih</i>	8
		<i>Mata Air</i>	6
		<i>Pengolahan Air Bersih</i>	2
		<i>Sumur Gali</i>	1.240
		<i>Sumur Pompa</i>	111
	<i>Tangki Air Bersih</i>	-	

8.	Prasarana Sanitasi dan Irigasi	MCK Umum	54
		Jamban Keluarga	485
		Saluran Drainase	Ada
		Pintu Air	8
		Saluran Irigasi	1.200 m

Tabel 9. Data sarana dan prasarana Desa Sriharjo

Data Tanah Kas Desa yang disewakan

NO	PERSIL	LUAS	KLAS	LOKASI	KETERANGAN
1	151	2,250	S.III	Tmr Ngentak Gong	Miri
2	173	1,500	S.II	Tmr Demen/Kln Makam	Jati
3	170	400	S.II	Tmr Demen Bks Selokan	Jati
4	158-159, 164-165	8,025	S.III	Jati Klinthing	PG
5	101	4,280	S.II	Sltm Puskesmas II	Sewa Pokdakan
6	15-17	2,100	S.III	Utr Pelemadu	Kelp. Kandang
7	14	750	S.II	Tmr PAUD Pelemadu	Kelp. Kandang
8	13	2,650	S.II	Utr Pelemadu	Pelemadu
9	4.b	1,400	S.I	Utr Krg Kulon	Sungapan
10	4	350	S.II	Utr Krg Kulon	Sungapan
11	18	900	S.II	Brtn Sungapan	Kelp. Kandang
12	12-15	7,000	S.II	Sltm. Karang Kulon	PG
13	37	2,000	S.III	Sltm Gondosuli	Kelp. Kandang
14	38	500	S.I	Blk tmr Gondosuli	Gondosuli
15	38	3,000	S.III	Sltm Gondosuli	Kelp. Kandang
16	99	3,400	S.II	Sltm Jmbtn Dogongan	Sewa Warga
17	99	1,000	T.II	Utr Jembatan Dogongan	Dogongan
18	127	4,550	T.II	Sltm Ketos	Ketos
19	127	1,800	T.III	Sltm Ketos	Ketos
20	133	17,780	T.I	Brtn Ngrancah	PG
21	175	1,000	S.V	Utr Ngrancah	Ngrancah
22	165	4,550	S.III	Utr Ngrancah	Ngrancah
23	164	2,150	S.III	Utr Ngrancah	Ngrancah
24	180.a	2,900	T.III	Tepi S. Ngrancah	Kelp Kandang
25	180.b	350	T.III	Tepi S. Ngrancah	Ngrancah
26	179	2,650	S.III	Tepi S. Ngrancah	Ngrancah

27	1	2,300	T.V	Blk Boto Putih	Hunian Relokasi
28	69	2,000	S.III	Bulak Sompok	Sompok
29	114	4,450	T.V	Sompok	Sompok
30	59	3,550	T.I	Blk Sompok Utr Ringin	Sompok
31	62	1,150	T.II	Blk Sompok	Sompok
32	82	1,000	D.V	Sompok/Wates	Sompok
33	28	8,600	D.V	Brk SD Sompok	Sompok
34	190	4,200	T.V	Wunut / Ngepoh	Wunut
35	191	4,850	T.V	Wunut / Ngepoh	Wunut
36	57 -59	29,000	T.III	Brk Trukan	PG
37	13	750	S.II	Utr Pelemadu	Pelemadu
38	57	1,000	T.III	Brk Trukan	Kelp. Kandang Trukan
39	163,164	7,000	P.III	Jati Klinthing	PG
40	172	2,700	S.III	Jati Klinthing	Kelp. Kandang Jati
41	36	650	D.V	Sltn Gondosuli	Bekas Lap. Voli
42	99	1,000	T.II	Sltn Jembatan Dogongn	Kelp. dang Dogongan
43	133	1,000	T.I	Barat Ngrancah	Kelp. Kandang Ngrancah
44	93	950	S.II	Jati	Pendopo Sri Budoyo
45	112	400	S.IV	Brk Jembtn Ketos	Kelp. Kandang
		155,785			

DATA TANAH LUNGGUH LURAH DAN PAMONG

NO	PAMONG DESA	LUAS	PERSIL	KLAS	LOKASI
1	2		4	5	6
1	LURAH DESA	4,345	55	S.I	Bulak Mojohuro
		815	53	S.I	Bulak Mojohuro
		1,680	53	S.II	Bulak Mojohuro
		2,650	13	S.II	Bulak Pelemadu
		1,950	53	S.II	Bulak Mojohuro
		4,050	14	S.II	Bulak Pelemadu
		280	54	S.I	Bulak Mojohuro
		6,520	54	S.I	Bulak Mojohuro
		22,290			
2	CARIK DESA				
		10,595	63	S.I	Bulak Miri /Tmr Gaten
		2,500	58	S.I	Bulak Utara Wilkel/ Klepu

3	KASI PEMERINTAHAN				
		11,105	58	S.1	Barat Lap. Desa
		1,770	10	S.1	Sltn Kr.Kulon
		500	74	S.II	Utara Trukan
		1,360	53	S.1	Brtn Ngentak/Eks Harjo S
		14,735			
4	KASI KESEJAHTERAAN				
		11,105	58	S.I	Bulak Klepu
		1,850	58	S.I	Kdl Kulon Sompok
		12,955			
5	KASI PELAYANAN	9,420	58	S.I	Bulak Klepu
		2,350	169	S.III	Bulak Ngrancah
		3,950	166	S.III	Bulak Ngrancah
		1,325			
		930			
		17,975			
6	KAUR TU DAN UMUM	3,250	88	S.I	Bulak Sungapan
		2,125	75	S.II	Bulak Brtn Laut Trukan
		2,250	76	S.II	Bulak Utr Trukan
		2,250	77	S.II	Bulak Utr Trukan
		1,000	74	S.II	Bulak Utr Trukan
		1,070	10	S.II	Bulak Sltn Kr. Kulon
		1,500	38		Bulak Tmr. Gondosuli
			63		Bulak Timur Gaten
7	KAUR KEUANGAN	11,105		S.I	
8	KAUR PERENCANAAN	2,000	128	S.II	Bulak Sompok
		3,000	63	S.I	Bulak Miri
		1,500	63	S.I	Bulak Miri
		4,900	168	S.IV	Blk Ngrancah
		11,400			

9	DUKUH MIRI	2,875	63	S.I	Bulak Miri
		2,335	4	S.II	Bulak Sungapan
		2,115	38	S.II	Bulak Gondosuli
		1,000	151	S.III	Bulak Miri
10	DUKUH JATI	2,765	53	S.I	Bulak Mojohuro
		700	122	S.III	Bulak Jati
		835	122	S.III	Bulak Jati
		1,000	122	S.III	Bulak Jati
		1,815	38	S.II	Bulak Tmr Gondosuli
		500	38	S.II	Bulak Tmr Gondosuli
		7615.00			
11	DUKUH MOJOHURO	3,250	58	S.II	Bulak Jati
		1,795	120	S.II	Bulak Jati
		1,100	38	S.II	Bulak Gondosuli
		1,000	121	S.II	Bulak Jati
		1,000	121	S.II	Bulak Jati
		8,145			
12	DUKUH PELEMADU	950	55	S.I	Bulak Mojohuro
		1,500	57	S.II	Bulak Mojohuro
		800	14	S.I	Bulak Utr Pelemadu
		800	14	S.I	Bulak Utr Pelemadu
		750	14	S.II	Bulak Utr Pelemadu
		500	14	S.II	Bulak Utr Pelemadu
		460	14	S.II	Bulak Sungapan
		1,200	13	S.I	Bulak Pelemadu
		1,000	14	S.II	Bulak Pelemadu

13	DUKUH SUNGAPAN	3,250	4	S.I	Bulak Sungapan
		2,320	18	S.II	Bulak Sungapan
		1,770	4	S.I	Bulak utr Kr. Kulon
14	DUKUH GONDOSULI	3,250	4	S.I	Bulak Sungapan
		1,000	4	S.I	Bulak Sungapan Bulak Gondosuli
		4,450	38	S.II	
15	DUKUH TRUKAN	2,000	39	S.II	Bulak Gondosuli
		3,275	38	S.II	Bulak Gondosuli
		13,350	61	T.I	Bulak Butuh
		700	57	T.II	Bulak Trukan
16	DUKUH DOGONGAN	1,070	13	S.I	Bulak Sungapan
		2,125	75	S.II	Bulak Trukan
		1,000	76	S.II	Bulak Trukan
		500	74	S.II	Bulak Lor Trukan
		600	63	S.I	Klepu
17	DUKUH KETOS	1,825	128	T.I	Bulak Ngrancah
		2,250	131	T.I	Bulak Ngrancah
		500	144	T.II	Bulak Ngrancah
		1,700	118	T.V	Bulak Ketos

		4,650	119	T.V	Bulak Ketos
		19,350	169	S.IV	Bulak Ngrancah
		715	38	S.II	Blk Tmr Gondosuli
18	DUKUH NGRANCAH	500	144	T.II	Bulak Ngrancah
		8,000	169	S.IV	Bulak Ngrancah
		2,600	164	S.II	Bulak Ngrancah
		4,000	164	S.II	Bulak Ngrancah
		1,325	166	S.IV	Bulak Ngrancah
		16,425			
19	DUKUH PENGKOL	1,300	144	T.II	Bulak Ngrancah
		3,700	7	T.V	Bulak Pengkol
		2,950	8	T.V	Bulak Pengkol
		3,450	145	S.IV	Bulak Ngrancah
		550	12	S.II	Bulak Pengkol
		600	12	S.II	Bulak Pengkol
		3,500	54	S.II	Bulak Trukan
20	DUKUH SOMPOK	48 0	60	T. I	Bulak Sompok
		65 0	61	T. I	Bulak Sompok
		5,05 0	62	T. I	Bulak Sompok
		4,78 5	93	T. I	Bulak Sompok
		30,40 0	70	T.V	Bulak Sompok
		2,45 0	93	T. I	Bulak Sompok
		1,65	93	T.III	Bulak Sompok

		0			
		19,300	149	T.V	Bulak Sompok
		3,600	26	T.V	Bulak Sompok
		1,000	94	T.III	Bulak Sompok
		4,200	105	S.I	Bulak Kdgmiri
		2,125	38	S.II	Bulak Gondosuli
21	DUKUH WUNUT	1,850	104	T. I	Blk Kedungmiri
		600	136	T.III	Blk Kedungmiri
		550	161	T.III	Blk Kedungmiri
		1,950	175	T. I	Blk Kedungmiri
		2,700	222	T.II	Blk Kedungmiri
		25,500	210	T.V	Blk Kedungmiri
		2,100	104	T.II	Blk Kedungmiri
		1,700	176	T. I	Blk Kedungmiri
		1,300	135	S.III	Blk Kedungmiri
		5,900	158	S.III	Blk Kedungmiri
		1,800	152	S.IV	Blk Kedungmiri
		450	159	S.IV	Blk Kedungmiri
		830	54	S.III	Blk Trukan
		500	46	S.II	Brt Blambangan
22	SUDADI	2,000	167	S.III	Blk Ngrancah
		500	38	S.II	Blk Tmr Gondosuli
		1,000	169	S.III	Blk Ngrancah
23	PARJIYANA		53	S.I	Blk Ngentak Mojohuro

		1,000			
		500	38	S.II	Blk Tmr Gondosuli
		500	37	S.II	tmr Gondosuli
		500	101	S.I	Sltn Puskesmas
		500	101	S.I	Sltn Puskesmas
24	SUHARSONO	1,000	63	S.I	Bulak Sltn Miri
		500	37	S.II	tmr Gondosuli
		2,050	14	S.II	Utr Pelemadu
26	RIWAYANTO	2,100	121	S.II	Blk Jati
		1,000	76	S.II	Blk Trukan

**DATA TANAH DESA DESA SRIHARJO UNTUK PENGAREM - AREM
LURAH DESA DAN PAMONG DESA**

NO	PERUNTUKAN	RINCIAN			Lokasi
		KLAS	PERSIL	LUAS	
1	Pengarem Carik	S.I	63	3000	Bulak Klepu Tmr Gaten
2	Kasi Kesejahteraan	S.I	58	3000	
3	Pengarem Kasi Pemerintahan	S.I	58	2,500	Bulak Barat Lapangan Desa
4	Pengarem Kaur Keuangan	S.I	53	3,000	Bulak Tmr Gaten
5	Barman (Dkh. Trukan)	T.I	61	900	Brt Butuh
		S.II	38	2200	Tmr Gondosuli
6	NGADISAN (Dkh. Trukan)	T.I	61	2000	Brt Butuh
		T.II	57	1000	Slt. Trukan
7	Pengarem Dk. Dogongan	S.II	14	2000	Utr Pelemadu
9	Pengarem Dk. Ngrancah	t.i /	131	3000	Blk Brt Ngrancah
		s.ii	64	2000	
11	Pengarem Staf Pemerintahan (Sukapdja)	S.II	122	1000	Selatan Jati
12	Pengarem Staf Umum (Darso Wiyono)	S.I	53	1200	Bulak Barat Ngentak
13	Pengarem Staf Ekbang (Waridja)	S.I	63	1000	Bulak Selatan Miri
14	Bekas Lungguh Waridjo	S.I	63	2,000	Bulak Selatan Miri
16	Bekas lungguh Harjo setomo	S.II	53	1250	Brt Mijen
19	Bks Lungguh Ponijan	S.II	77	2,000	Bulak Utr Trukan
20	Bks Lungguh Sukapjo	S.II	173	1,500	Bulak Jati
21	Bks Lungguh Pak Yantudi	T.I	104	4500	Bulak Brt Makam Kdgmiri
22	Bks Lungguh Cip Miri Pelayangan	S.II	122	600	Bulak Jati

24	Bks Lungguh Dk Pelemadu	S.II	63	1, 450	Bulak Brt Demi
25	Bks Lungguh Dk Pelemadu	S.II	63	4 40	Bulak Brt Demi
26	Bks Lungguh Dk Rohmad	T.I	128	1825	Bulak Ngrancah Brt
27	Bks Lungguh Dk Rohmad	T.I	131	2350	Bulak Ngrancah Brt
28	Bks Pengarem Muhadi	S.I	58	1000	Bulak Klepu/Eks Muhadi
29	Bks Pengarem Muhadi	S.I	58	1,300	Bulak Klepu/Eks Muhadi
30	Bks Pengarem Pujo winardi	S.I	63	1, 200	Wetan gaten

DATA TANAH UNTUK FASILITAS UMUM

NO	PENGGUNAAN	RINCIAN			LOKASI
		LUAS	PERSIL	KELAS	
1	2	3	4	5	6
1	Kantor Desa	3,200	93	S.II	Mojohuro
2	SD Sriharjo	2,250	93	S.II	Mojohuro
3	SD Sriharjo Sltn	1,560	45	S.III	Mojohuro
4	SD Ngrancah	2,030	161	P.II.a	Ngrancah
5	SD Kedungmiri	2,830	128	S.III	Wunut
6	SDN Sompok	2,330	50	S.III	Sompok
7	Puskesmas Img II	3,330	97	S.I	Mojohuro
8	Lapangan Desa	7,850	91	S.III	Mojohuro
9	Masjid dan PAUD Ketos	800	121	S.III	Ketos
10	TK PKK 3	1,080	53	S.I	Mojohuro
11	Pasar Desa	750	99	S.II	Mojohuro
12	Mushola NgentakMijen	240	53	S.I	Mojohuro
13	Mushola Wunut	350	222	S.III	Wunut
14	Masjid Kdgmiri	800	127	S.I	Wunut
15	Pustu Wunut	500	158	S.III	Wunut

16	TK PKK 91	750	50	T.II	Sompok
17	Rumah Kompos (Kelp. Tani)	100	12	S. V	Pengkol
18	PAUD Miri	280	151	S.III	Wetan Ngetak Gong
19	Panggung Terbuka Ds Wisata	1,000	158	SL.III	Kedungmiri

4.2 RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Berdasarkan hasil Pengkajian Keadaan Desa (penggalian serta analisis potensi dan masalah) yang dilakukan melalui beberapa kali pertemuan, seperti musyawarah dusun, diskusi sektoral, musyawarah desa, maupun diskusi mendalam lainnya, dirumuskan prioritas masalah yang hendak diselesaikan selama enam tahun penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sriharjo ke depan sebagai berikut.

4.2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Dalam hal penyelenggaraan Pemerintahan Desa, beberapa persoalan strategis yang masih mengemuka dan membutuhkan perhatian adalah berkait dengan pelayanan administrasi kependudukan, pertanahan, Sistem Informasi Desa (SID), Profil Desa, transparansi pengelolaan keuangan desa, dan kapasitas aparat penyelenggara pemerintahan.

Dalam hal pelayanan administrasi kependudukan, sesungguhnya Desa Sriharjo telah jauh lebih maju dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ruang pelayanan satu atap dengan staff pelayanan yang memiliki kapasitas baik, telah cukup mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Hal ini menjadi

penting untuk terus dipertahankan dan terus ditingkatkan dalam waktu-waktu mendatang. Penguatan kapasitas (*upgrading*) bagi staff/aparat pelayanan tetap penting untuk terus ditingkatkan demi pelayanan prima bagi masyarakat. Berkait dengan aksi simpati, yakni pelayanan pembuatan akta kematian dalam sehari, sudah dilakukan dengan baik. Situasi ini penting untuk dipertahankan dalam waktu-waktu mendatang.

Persoalan yang masih nampak dalam hal pelayanan adalah berkaitan dengan pertanahan. Dalam hal ini, terdapat setidaknya tiga persoalan mendasar. *Pertama*, berkaitan dengan standard pelayanan terutama pelayanan alih status kepemilikan tanah warga. Penting untuk segera dibuat aturan tertulis mengenai mekanisme pelayanan administrasi pertanahan. *Kedua*, persoalan berkaitan dengan pertanahan adalah sertifikasi tanah milik warga. Masih terdapat sertifikat tanah warga yang belum selesai proses pengurusannya sejak bertahun-tahun lalu, sehingga warga menginginkan untuk segera diselesaikan. Selain itu, masih banyak pula tanah warga yang masih berstatus letter C, belum bersertifikat, yang membutuhkan pelayanan dari Pemerintah. *Ketiga*, persoalan tanah yang lain adalah tanah milik desa. Dalam hal ini, Desa Sriharjo belum memiliki Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Tanah Desa yang selaras dengan Peraturan Gubernur Nomor 34 tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa. Status tanah desa yang ada pada saat ini juga masih belum bersertifikat (masih letter C). Selain itu, terdapat satu masalah lain, yakni terkait proses tukar guling tanah desa dengan tanah warga di masa yang lalu, yang digunakan untuk fasilitas publik.

Persoalan ini harus segera diselesaikan, dan ditargetkan selesai pada periode RPJMDesa enam tahun ini.

Berkait dengan Profil Desa dan Sistem Informasi Desa (SID) Desa Sriharjo juga masih mengalami persoalan yang cukup signifikan. SID merupakan wajah desa. Media ini akan menjadi rujukan bagi banyak pihak untuk melihat kedalaman Desa Sriharjo, untuk kemudian berkomitmen menjalin kerja sama dengan Desa mengembangkan potensi yang ada demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Desa Sriharjo. SID diharapkan juga dapat menjadi media promosi bagi Desa untuk bisa mengembangkan segenap potensi yang ada di Desa, menjadi media untuk “menjual” produk-produk Desa yang ada, sehingga harapannya dapat meningkatkan harkat, derajat, dan kesejahteraan seluruh warga Desa Sriharjo. Hanya saja, saat ini SID belum dikelola secara optimal, baru berjalan apa adanya. Sehingga, dalam periode enam tahun ke depan, SID menjadi satu prioritas program Pemerintah Desa.

Berkait dengan SID, profil desa menjadi elemen penting yang mutlak harus ada. Selain sebagai sumber referensi dari berbagai pihak mempertimbangkan kerjasama pengembangan Desa di Sriharjo, profil desa sangat dibutuhkan sebagai basis data awal untuk mengambil kebijakan dalam hal apapun. Sementara, hingga saat ini, profil desa belum dapat *diupdate* secara reguler dan optimal.

Dalam hal pengentasan kemiskinan, angka kemiskinan di Desa Sriharjo masih tergolong tinggi. Untuk dapat melakukan upaya-upaya pengentasan kemiskinan, satu hal yang harus ada di

tahap awal adalah basis data yang valid. Sedangkan data kemiskinan di Desa Sriharjo masih belum *valid*, sehingga perlu untuk terus menerus *direview* dan *diupdate*.

Persoalan lain terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah berkait dengan transparansi penyelenggaraan keuangan. Selama ini informasi penyelenggaraan keuangan baru sebatas pengumuman yang diletakkan di balai desa, belum pada tempat-tempat strategis.

Terakhir, persoalan mendasar yang masih dirasakan berkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah kapasitas aparatur penyelenggara Pemerintahan Desa. Pemahaman dan perspektif pelayanan publik, implementasi UU Desa, kapasitas penanganan masalah secara sektoral, masih harus terus menerus *diupgrade*.

4.2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Bidang pelaksanaan pembangunan desa tidak hanya terpaku pada pembangunan fisik semata, akan tetapi juga persoalan pembangunan manusia. Sub bidang pendidikan, pariwisata, penataan permukiman dan kawasan, menjadi beberapa sub bidang yang masuk dalam kategori bidang pembangunan desa. Dalam bidang ini, persoalan yang mengemuka nampak di hampir semua sub bidang.

Dalam hal tata ruang, Desa Sriharjo hingga saat ini belum memiliki desain tata ruang yang akan menjadi pedoman pembangunan desa. Hal ini akan menjadi prioritas bagi Desa

untuk segera menyusun dokumen tata ruang tata wilayah Desa. Berkait dengan pendidikan, persoalan yang mengemuka lebih pada kurangnya sarana prasarana pendidikan anak usia dini (PAUD dan TK), baik TK yang dimiliki desa maupun lembaga PAUD yang dimiliki kelompok masyarakat/ pedukuhan. Pada TK milik desa, kesejahteraan pengajar juga hingga saat ini belum dapat dipenuhi dengan layak oleh Desa.

Dalam hal pariwisata, potensi pariwisata yang ada belum tergarap sama sekali. Dibutuhkan kapasitas pengelolaan, organisasi pengelola pariwisata yang kuat, dan sarana prasarana pariwisata yang memadai. Dalam hal permukiman dan lingkungan, banyak sarana prasarana jalan di wilayah Desa Sriharjo yang rusak, maupun tidak layak. IPAL komunal juga menjadi kebutuhan mendesak yang saat ini dirasakan warga. Persoalan sampah juga menjadi issue/permasalahan krusial di semua Pedukuhan di Desa Sriharjo.

Berkaitan dengan perhubungan, banyak jalan-jalan yang belum memiliki penerangan jalan yang memadai. Di beberapa ruas jalan kabupaten dan provinsi pun penerangan jalan masih dirasa kurang memadai. Hal lain kaitan dengan perhubungan adalah sarana prasarana komunikasi. Terutama di wilayah Desa Sriharjo bagian timur, mulai dari Pedukuhan Ketos hingga pedukuhan paling ujung timur (Wunut) jaringan seluler tidak memadai. Signal seluler sangat lemah, bahkan tidak ada sama sekali. Hal ini jelas menghambat komunikasi maupun pengembangan potensi wisata dan potensi ekonomi warga khususnya di daerah tersebut.

4.2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Dalam bidang ini, permasalahan juga nampak di semua sub bidang. Dalam hal keamanan dan ketertiban, persoalan regenerasi Linmas Desa masih menjadi masalah berarti. Ancaman bencana menjadi masalah krusial yang dialami warga. Dalam hal keagamaan, masalah potensi intoleransi di antara pemeluk agama dan keyakinan yang berbeda masih ada, sehingga membutuhkan langkah-langkah pencegahan. Dalam bidang keagamaan, persoalan yang muncul masih pada kecukupan sarana prasarana ibadah, dan ketersediaan serta kesejahteraan kaum rois dan pengajar mengaji (TPA).

Dalam hal kebudayaan, potensi budaya yang luar biasa besar masih menyisakan persoalan, yakni terkait dengan pengorganisasian pengembangan kebudayaan yang ada, juga persoalan publikasi yang masih sangat kurang, sehingga potensi budaya yang ada selama ini belum dapat diangkat dengan baik. Senada dengan kebudayaan, dalam hal olahraga, potensi olah raga yang demikian besar belum dapat dioptimalkan karena pengorganisasian yang kurang kuat, juga fasilitasi pengembangan potensi yang masih kurang. Dalam hal kelembagaan masyarakat desa, masih diperlukan dorongan dan fasilitasi yang kuat dari Pemerintah Desa agar lembaga kemasyarakatan desa yang ada benar-benar dapat berjalan dengan baik.

4.2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Dalam bidang pemberdayaan masyarakat, persoalan perlindungan perempuan dan anak masih menjadi satu hal yang mengemuka. Tingkat perceraian baik pada pasangan muda maupun pasangan yang sudah cukup lama, bisa dikategorikan cukup tinggi. Fenomena kekerasan terhadap perempuan, Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) juga masih saja nampak. Pemberdayaan perempuan kepala keluarga juga menjadi bagian yang masih harus dilakukan. Termasuk dalam hal ini perlindungan dan pemberdayaan anak dan difabel membutuhkan perhatian yang besar dari Pemerintah Desa.

Dalam bidang pertanian, peternakan dan perikanan, persoalan yang muncul lebih kepada peningkatan sarana prasarana pertanian dan perikanan, juga penguatan organisasi/kelembagaannya. Peningkatan kualitas dan kuantitas produk pertanian menjadi kebutuhan yang saat ini ada, termasuk berkait dengan pemasaran dan *packaging produk* pertanian. Distribusi pupuk juga masih menjadi persoalan yang dirasakan oleh para petani di Sriharjo. Di samping itu, saat ini pengembangan pertanian di Desa Sriharjo kebanyakan masih menggunakan bahan kimia (pupuk dan pestisida) sehingga penting untuk segera dimulai budidaya pangan yang lebih sehat.

Dalam hal peternakan, di beberapa wilayah, waga masih membutuhkan fasilitasi tanah kas desa untuk lokasi kandang kelompok. Kurangnya kapasitas dalam mengolah pakan ternak dan mengolah limbah peternakan, juga masih dirasakan sebagai persoalan. Dalam hal perikanan, selain sarana prasarana, yang

menjadi persoalan adalah juga berkaitan dengan permodalan, peningkatan produksi, dan pemasaran.

Dalam pengembangan ekonomi kreatif warga masyarakat di Desa Sriharjo, potensi industri rumah tangga yang luar biasa besar belum dapat dioptimalkan dengan baik. Di beberapa titik, potensi kerajinan masih belum bisa berkembang dengan pesat. Kurangnya kapasitas peningkatan produksi, packaging, permodalan, hingga pemasaran merupakan persoalan yang dirasakan oleh warga pelaku UMKM di Desa Sriharjo.

Kaitan dengan pasar desa, saat ini kondisi pasar bisa dikatakan terbengkalai. Kios dan pasar desa belum dapat dikelola dengan baik. BUMDes sebagai media peningkatan Pendapatan Asli Desa, belum terbentuk. Potensi lembaga keuangan mikro yang ada di desa juga belum dikelola secara optimal untuk mendukung bergeraknya roda perekonomian desa.

4.2.5. Bidang Kebencanaan, Keadaan Darurat dan Mendesak

Berkait dengan kebencanaan, keadaan darurat dan mendesak, seluruh wilayah Desa Sriharjo berada pada daerah rawan bencana, baik itu banjir, tanah longsor, gempa bumi, maupun wabah penyakit. Persoalan yang masih mengemuka terkait dengan kebencanaan adalah pada organisasi penanganan bencana yang masih perlu diperkuat, juga sarana prasarana penanggulangan bencana yang kurang. Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana juga cenderung masih belum merata. Dana maupun sumber daya lainnya yang dicadangkan secara khusus

untuk upaya penanggulangan bencana juga belum ada di Desa Sriharjo.

BAB V

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF

5.1. VISI DAN MISI

5.1.1. Visi

Visi Desa merupakan cita-cita besar yang ingin diraih selama 6 (enam) tahun periode pembangunan jangka menengah Desa. Visi inilah yang akan mengarahkan segenap program dan kegiatan-kegiatan pembangunan desa selama 6 tahun.

Visi Desa Sriharjo tidak sekedar visi lurah Desa Sriharjo terpilih semata, namun pada hakekatnya merupakan visi dari seluruh masyarakat Desa Sriharjo. Sehingga, penyusunan visi Desa Sriharjo dilakukan melalui serangkaian proses panjang yang melibatkan segenap komponen masyarakat dan seluruh unsur kelembagaan di Desa Sriharjo.

Selama periode 2019-2025 kedepan, Desa Sriharjo memiliki visi sebagai berikut: *Menuju Sriharjo Mandiri, Berdaulat, Demokratis, Religius, Dan Sejahtera*

Mandiri Dan Berdaulat

Sriharjo mandiri dan berdaulat memiliki makna bahwa sebagaimana mandat UU Desa, Desa Sriharjo memiliki kemandirian/otonomi dalam mengatur rumah tangga desa sendiri dan mengatur kehidupan bermasyarakat tanpa diintervensi/dipengaruhi oleh pihak manapun. Kemandirian tanpa intervensi ini, bukan berarti Sriharjo tidak membutuhkan bantuan dari pihak luar, baik itu Pemerintah Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, Pusat, Perguruan Tinggi, LSM, maupun swasta. Sriharjo tetap menjunjung tinggi NKRI, siap berkontribusi membangun kejayaan negeri dimulai dari desa.

Sriharjo membuka diri terhadap segala bentuk kerjasama yang membangun dari pihak luar, baik itu Perguruan Tinggi, LSM, maupun Swasta untuk mewujudkan masyarakat Desa Sriharjo yang sejahtera. Hanya saja, kedaulatan dan kehormatan desa tetap harus dipegang teguh dalam kerangka kerja sama ini.

Dalam mencapai kemandirian terdapat prasyarat yang harus dipenuhi, salah satunya adalah adanya sumber pendanaan sendiri (baca: Pendapatan Asli Desa-PADes). Dengan PADes, Desa Sriharjo akan lebih leluasa dalam mengelola anggaran, menyelenggarakan program-program yang bertujuan mengangkat harkat hidup seluruh masyarakat Desa Sriharjo. Oleh karenanya, selama 6 tahun ke depan, dengan dukungan seluruh elemen masyarakat Desa Sriharjo dan segenap jajaran Pemerintah Desa Sriharjo, BPD, serta dukungan dan kerjasama dengan berbagai pihak, baik Pemerintah maupun Perguruan Tinggi, LSM, swasta, Pemerintah Desa Sriharjo bertekad meningkatkan PADes dengan cara mengoptimalkan segenap aset (material dan non material-SDM) yang dimiliki desa, dan membangun BUMDesa.

Kedaulatan desa juga tercermin dalam budaya masyarakat. Sebagai bagian dari NKRI, Sriharjo juga memiliki budaya adiluhung yang merupakan bagian dari bentuk kedaulatan bangsa. Budaya bangsa selain tercermin dalam sikap (gotong royong, tepo seliro, saling menghormati, toleran, dan lain-lain) juga tercermin dari seni budaya yang terbangun. Telah menjadi tekad Pemerintah Desa Sriharjo, bahwa selama enam tahun ke depan akan dilakukan upaya-upaya untuk memperkuat budaya tersebut, baik yang terwujud dalam sikap dan perilaku maupun pengembangan seni budaya lokal

Sriharjo. Dengan demikian, harapan adanya daulat budaya di Desa Sriharjo benar-benar bisa terwujud.

Demokratis

Sriharjo yang demokratis tercermin dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang terbuka, bertanggung jawab, jujur, adil, tanpa korupsi, dan melibatkan segenap elemen masyarakat dalam pengambilan keputusan. Desa Sriharjo yang demokratis juga tercermin dalam kehidupan bermasyarakat, dimana terjadi saling menghormati diantara sesama warga.

Kehidupan demokratis juga diharapkan tercermin dalam pengambilan keputusan di kelompok-kelompok masyarakat mulai dari keluarga, RT, Pedukuhan, dan organisasi kemasyarakatan yang ada. Pengambilan keputusan diharapkan diambil berdasarkan musyawarah, saling menghormati, dan melibatkan seluruh komponen dalam kelompok. Sikap yang demokratis juga diharapkan dimiliki oleh setiap warga Desa Sriharjo untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat dan berdesa yang demokratis.

Religius

Sriharjo yang religius tercermin dalam pola kehidupan masyarakat yang senantiasa mendasarkan segenap aktivitasnya pada pertanggungjawaban *ilahiyyah*. Dengan

demikian, setiap diri senantiasa mempertimbangkan langkah-langkahnya untuk berbuat kebaikan dan menjauhkan diri dari perbuatan tercela/tidak baik.

Sejahtera

Masyarakat dikatakan sejahtera, apabila terdapat situasi dimana masyarakat berkecukupan dalam hal pangan, sandang, papan. Selain itu, masyarakat bisa dikatakan sejahtera apabila terdapat jaminan kesehatan, terpenuhi kebutuhan akan pendidikan dasar, hidup aman dan tenteram, tercukupi hiburan dan hobinya, jauh dari ancaman kekerasan dan bencana alam, serta bebas dari stigma maupun diskriminasi/peminggiran. Dalam konteks ini, Pemerintah Desa Sriharjo akan berupaya untuk lebih memperhatikan kelompok-kelompok rentan dalam masyarakat seperti perempuan, warga miskin, anak, dan difabel agar terhindar dari kekerasan, stigma, dan diskriminasi.

Dalam mencukupi kebutuhan pangan masyarakat di Desa Sriharjo, Pemerintah Desa bertekad untuk memastikan ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat desa Sriharjo tanpa kecuali. Upaya yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan pemetaan dan analisis kebutuhan pangan masyarakat dilanjutkan dengan memperbaiki dan meningkatkan kualitas serta kuantitas produksi pertanian, peternakan, perikanan, pengolahan

pangan lokal, serta membangun ketahanan dan kedaulatan pangan di Desa Sriharjo.

Ketahanan pangan akan senantiasa diikuti oleh kedaulatan atas pangan. Dalam hal ini, ketahanan pangan berarti tercukupinya kebutuhan atas pangan bagi masyarakat Desa Sriharjo. Dalam menjamin tercapainya ketahanan pangan ini, dibutuhkan kedaulatan atas pangan. Sebenarnya Desa memiliki beragam varietas pangan yang bisa dihasilkan dari tanah sendiri, cocok, serta mudah dikembangkan di tanah sendiri yang selama ini kadang tergilas oleh opini dan pasokan pangan dari luar. Sebut saja salah satunya gandum. Seperti halnya masyarakat pedesaan di wilayah lainnya, masyarakat Desa Sriharjo demikian ramah dengan gandum. Konsumsi gandum hampir setiap hari dilakukan. Padahal konkret, desa ini tidak mampu memproduksi gandum. Hal ini tentu mengancam ketahanan pangan jika masyarakat berada pada taraf ketergantungan pada varietas pangan semacam ini, karena desa tidak dapat memproduksi sendiri jenis pangan tersebut. Ancaman ketahanan pangan karena masyarakat mengkonsumsi bukan pangan lokal juga akan nampak pada ancaman perputaran perekonomian akibat gaya hidup masyarakat yang tidak mengedepankan konsumsi pangan lokal yang ada, tetapi terus mengambil jenis pangan dari luar yang tidak bisa diproduksi sendiri.

Upaya membangun ketahanan pangan di Desa Sriharjo hendak dilakukan mulai dari hal yang sederhana, seperti upaya mengoptimalkan lahan pekarangan maupun menanam tanaman pangan dengan polybag di setiap rumah, beternak untuk kecukupan gizi keluarga, dan lain-lain. Upaya lain yang hendak dilakukan adalah dengan memulai kembali membangun lumbung pangan sebagai strategi antisipasi mengatasi persoalan pangan di kala krisis. Lumbung pangan bias berupa lumbung hidup maupun lumbung pangan dalam bentuk ketersediaan bahan pangan (stok). Tentu saja hal ini bisa dilakukan manakala telah tumbuh kesadaran dalam diri masyarakat. Sehingga membangun kesadaran dan gerakan bersama menjadi satu hal yang hendak dilakukan. Demikian juga dalam meraih kedaulatan atas pangan, hal ini hanya bisa dilakukan dengan membangun kesadaran dan gerakan mencintai pangan lokal.

5.1.2. Misi

Visi Desa Sriharjo diturunkan dalam beberapa misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik Pemerintah Desa Sriharjo, baik yang berkaitan dengan persoalan administrasi kependudukan, pertanahan, pendidikan, kesehatan, dan hal-hal lainnya

2. Membangun tata kelola Pemerintahan Desa Sriharjo yang bebas korupsi, transparan, adil gender, dan partisipatif
3. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) melalui optimalisasi aset Desa dan Pengembangan BUMDes
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Sriharjo melalui pengembangan ekonomi kreatif dan pengembangan pariwisata desa dengan mengoptimalkan teknologi tepat guna dan teknologi informasi
5. Mewujudkan ketahanan dan kedaulatan atas pangan di Desa Sriharjo melalui optimalisasi potensi pertanian, peternakan, perikanan, intensifikasi dan diversifikasi lahan pekarangan, serta membangun kesadaran dan gerakan cinta pangan lokal.
6. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Desa Sriharjo melalui peningkatan fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan, serta bersama-sama instansi pendidikan dan kesehatan mendorong lahirnya gerakan sadar pendidikan dan kesehatan
7. Mengembangkan potensi budaya, olah raga, dan kepemudaan, serta membangun kehidupan masyarakat Desa Sriharjo yang religius
8. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta difabel di Desa Sriharjo

9. Meningkatkan upaya-upaya Pelestarian lingkungan dan Pengurangan Resiko Bencana

Berikutnya, misi ini akan diterjemahkan ke dalam program-program strategis dan kegiatan-kegiatan pemerintahan selama enam tahun ke depan, yakni kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

5.2 Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Kebijakan pembangunan Desa Sriharjo selama enam tahun ke depan (2019-2025) akan diarahkan pada pencapaian visi dan misi Desa Sriharjo. Membangun fondasi kemandirian finansial desa menjadi prioritas kebijakan pembangunan Desa Sriharjo selama 6 (enam) tahun ke depan. Harapannya, kemandirian keuangan desa dapat menopang upaya-upaya pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, hingga penanggulangan bencana yang hendak dilakukan pada masa yang akan datang.

Pembentukan dan penguatan BUMDes serta optimalisasi aset desa, merupakan upaya yang hendak dilakukan dalam membangun kemandirian finansial desa. Proses membangun BUMDes, akan diarahkan tidak saja pada penguatan serta pengembangan modal dan laba dari BUMDes, tetapi juga mendasarkan prakarsa masyarakat dalam pengelolaan BUMDes. Mendorong lahirnya gagasan pengembangan BUMDes dari

masyarakat, dan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan BUMDes merupakan bagian dalam membangun prakarsa tersebut. Dalam penguatan modal BUMDes, membangun investasi dari masyarakat dalam pengembangan BUMDes menjadi salah satu skema besar yang ingin dilakukan dalam membangun BUMDes Desa Sriharjo.

Dalam kerangka menuju masyarakat Desa Sriharjo yang sejahtera, pengentasan kemiskinan menjadi prioritas utama dalam arah pembangunan Desa Sriharjo selama 6 (enam) tahun mendatang. Angka kemiskinan di Desa Sriharjo yang masih demikian tinggi, harus ditangani dengan program-program strategis. Semua program pemberdayaan masyarakat, hendak diarahkan dalam kerangka pengentasan/penanggulangan kemiskinan. Dalam pengentasan kemiskinan, upaya mengatasi kemiskinan absolut juga hendak dilakukan dalam bentuk *charity (bantuan langsung)*, yang diwujudkan diantaranya dalam bentuk bantuan MCK, RTLH, pemberian konsumsi/makanan langsung, serta pemberian bahan makanan pokok bagi warga miskin.

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan, skema yang akan dibangun adalah dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Berbagai elemen masyarakat di Desa Sriharjo akan dilibatkan mulai dari perencanaan upaya penanggulangan kemiskinan -termasuk di dalamnya identifikasi berbagai aspek penyebab penanggulangan kemiskinan dan perumusan indikator kemiskinan- pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan hingga monitoring evaluasi.

Upaya penanggulangan kemiskinan akan diawali dengan membangun data kemiskinan terpadu Desa Sriharjo. Proses ini hendak melibatkan segenap elemen masyarakat yang peduli dan memiliki kapasitas dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pelibatan masyarakat hendak dimulai dari proses perumusan indikator kemiskinan, yang nantinya akan menjadi basis/dasar penyusunan instrumen pendataan warga miskin di Desa Sriharjo. Selanjutnya, dalam kerangka penanggulangan kemiskinan ini, akan didorong lahirnya institusi/organisasi/komunitas di Desa yang secara khusus akan mengawal program-program pengentasan kemiskinan di Desa Sriharjo.

Sebagaimana telah disampaikan di depan, pembangunan di berbagai sector menjadi bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan. Selama 6 (enam) tahun ke depan, Pemerintah Desa Sriharjo bertekad untuk melaksanakan pembangunan di berbagai sector dengan mengedepankan partisipasi masyarakat.

Di bidang pertanian, Kelompok Tani di setiap pedukuhan, Gapoktan, P3A di setiap blok pertanian, GP3A, Taruna Tani, dan Kelompok Wanita Tani, akan menjadi motor penggerak dalam pembangunan di sektor pertanian. Membangun budaya pertanian organic akan menjadi program pembangunan Desa sriharjo di sector pertanian selama 6 tahun ke depan. Pembangunan pertanian juga akan diarahkan pada gerakan budidaya tanaman pendukung bahan baku bagi pengembangan UMKM (kacang dan kedelai) di Desa Sriharjo. Selain itu, mengoptimalkan pendapatan petani melalui peningkatan produksi, manajemen pertanian, pengemasan, pemasaran, hingga pengolahan limbah pertanian

akan menjadi program besar Pemerintah Desa Sriharjo selama 6 tahun ke depan.

Tidak hanya pengemasan, proses *branding produk* pertanian Desa Sriharjo akan menjadi bagian dalam arah kebijakan desa. Upaya pemanfaatan lahan tandus dan pekarangan juga menjadi bagian dari kebijakan ini. Pengolahan hasil produksi pangan lokal, untuk bisa ditingkatkan nilai jualnya, menjadi bagian besar di dalamnya. Kebijakan ini dimaksudkan selain untuk meningkatkan pendapatan petani, juga sebagai bagian dari upaya membangun ketahanan dan kedaulatan atas pangan di Desa Sriharjo.

Gerakan “Jemuwah mBrakah” akan dicanangkan untuk membangun budaya mencintai pangan lokal guna mewujudkan ketahanan dan kedaulatan atas pangan di Desa Sriharjo. Gerakan ini merupakan gerakan dimana setiap warga Desa Sriharjo setiap hari Jumat diwajibkan hanya mengonsumsi makanan hasil pertanian local Desa Sriharjo (ketela, jagung, umbi-umbian, dan buah-buahan).

Di sector peternakan, upaya pengembangannya akan dilakukan melalui pemberdayaan peternak. Seperti halnya pertanian, optimalisasi hasil peternakan akan dilakukan melalui peningkatan produksi, manajemen peternakan, pemasaran hingga pengolahan limbah peternakan. Dalam hal ini, kotoran ternak akan diolah menjadi pupuk kandang yang akan menunjang pembangunan budaya pertanian organik di Desa Sriharjo. Dalam bidang perikanan, pemberdayaan dan pendampingan kelompok perikanan mulai dari manajemen usaha perikanan, pembibitan,

peningkatan produksi, pemasaran akan digalakkan selama enam tahun yang akan datang.

Berkait dengan sector usaha mikro, Desa Sriharjo memiliki cukup banyak UMKM mulai dari usaha makanan hingga handicraft yang akan didorong laju pertumbuhan usahanya. Pengembangan ekonomi kreatif ini hendak dilakukan melalui pendampingan produksi (pengadaan bahan baku hingga peningkatan kualitas produksi), pengemasan/packaging, hingga pemasaran. Membangun *market place online* akan diupayakan selama penyelenggaraan pemerintahan 6 tahun ke depan. Membangun *showroom produk lokal* juga akan menjadi gagasan besar yang akan diwujudkan dalam program 6 tahun. Dalam rancangannya, pengelolaan showroom ini nantinya akan diserahkan kepada BUMDesa.

Berkaitan dengan pengembangan pariwisata desa, selama enam tahun ke depan, potensi pariwisata yang hendak dikembangkan antara lain wisata alam dan wisata sungai, terdiri dari Pedukuhan Pelemadu, Sungapan, Trukan, Dogongan, Gondosuli, Ketos, Ngrancah, Pengkol, Sompok, dan Wunut. Wisata edukasi ekonomi, yakni proses pembuatan olahan pangan seperti rempeyek, akan dikembangkan di beberapa Pedukuhan (Pelemadu, Sungapan). Wisata edukasi pertanian akan dikembangkan di Wunut dan area pengembangan budaya pertanian organic. Wisata religi dan budaya akan dikembangkan di Pedukuhan Jati. Pembangunan *rest area* sebagai penopang mobilitas ke arah *situs/destinasi* wisata dirancang pada tahun

ketiga/keempat rencana pembangunan jangka menengah desa periode 2019-2025 ini.

Erat kaitannya dengan pengembangan pariwisata, Pemerintah Desa Sriharjo selama enam tahun ke depan hendak merancang pengembangan seni budaya Desa Sriharjo. Target “Desa Budaya” diharapkan dapat diraih selama periode pembangunan enam tahunan kali ini. Dalam pengembangan seni dan budaya yang ada, hendak didorong lahirnya dewan kebudayaan dan sanggar seni budaya terpadu di Desa Sriharjo. Dengan fasilitasi Pemerintah Desa, Dewan Kebudayaan inilah yang nantinya akan memikirkan bagaimana mengembangkan seni budaya yang ada, dimulai dari pemetaan potensi dan penyusunan peta langkah pengembangan.

Dalam bidang kepemudaan, Karang Taruna akan diarahkan sebagai leading sector pengembangan potensi kepemudaan, juga sebagai lembaga yang turut menyelesaikan persoalan yang dialami pemuda desa. Inisiasi dan pengembangan sanggar kegiatan belajar bagi remaja dan pemuda dirancang selama periode ini sebagai media untuk memberi ruang kegiatan positif bagi pemuda dan remaja di Desa Sriharjo, sehingga akan mengurangi kegiatan negatif yang mungkin dilakukan para remaja dan pemuda. Sanggar belajar ini dirancang dalam bentuk media informal yang menaungi minat dan bakat para remaja dan pemuda sekaligus sebagai media saling belajar dan mengembangkan diri.

Dalam bidang olah raga, pengembangan potensi olah raga yang dimulai dari pemetaan potensi, permasalahan, hingga arah pengembangannya hendak diserahkan kepada Dewan Olah Raga

Desa. Pembinaan olah raga para remaja dan pemuda hendak difasilitasi Pemerintah Desa, melalui Dewan Olah raga.

Berkaitan dengan pengembangan pendidikan, baik pendidikan anak usia dini maupun anak usia SD dan SMP, akan juga dilakukan dengan pelibatan segenap elemen masyarakat di Desa Sriharjo. Forum PAUD dengan fasilitasi Pemerintah Desa merupakan pihak yang akan memikirkan pengembangan PAUD di Desa Sriharjo. Pengembangan PAUD akan dilakukan mulai dari infrastruktur fisik, Alat Permainan Edukatif (APE), kesejahteraan guru, sampai dengan peningkatan kapasitas guru. Pengembangan TK milik desa, yakni TK PKK 3 Sriharjo dan TK PKK 91 Sriharjo, akan menjadi bagian dari arah kebijakan program Pemerintah Desa selama 6 tahun mendatang. Dukungan terhadap pengembangan TK-TK selain milik Desa (baca: milik Yayasan) yang berada di Desa Sriharjo juga hendak dilakukan, mengingat anak-anak yang menuntut ilmu di sekolah tersebut adalah juga anak-anak Desa Sriharjo yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Desa Sriharjo.

Pengembangan pendidikan untuk usia SD dan SMP hendak diarahkan tidak sekedar pendidikan formal namun juga sampai pada pembangunan karakter anak. Dalam hal ini sanggar-sanggar belajar akan menjadi media untuk itu. Sedangkan untuk menunjang pendidikan formal, Pemerintah Desa hendak memfasilitasi adanya bimbingan belajar bagi anak-anak.

Berkaitan dengan kesehatan, untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, Pemerintah Desa bekerja sama dengan Puskesmas merancang program-program seperti posyandu balita

dan lansia, posbindu, dan meningkatkan fasilitasi serta kapasitas para kader kesehatan yang ada. Konvergensi pencegahan stunting juga menjadi perspektif dalam pembangunan kesehatan masyarakat Desa Sriharjo selama 6 tahun ke depan.

Dalam hal pemberdayaan, perlindungan perempuan, anak, dan difabel, Pemerintah Desa akan mendorong dan memfasilitasi TP PKK, kader sehat, kader KB, dan lembaga-lembaga/komunitas yang concern di bidang ini untuk mengawal proses pemberdayaan dan perlindungan perempuan, anak, dan difabel di Desa Sriharjo.

Dalam hal perlindungan perempuan, anak, dan difabel, hendak diinisiasi forum perlindungan perempuan anak dan difabel yang memiliki peran mensinergikan peran-peran perlindungan lintas sector, melakukan pemetaan dan penanganan awal, serta melaksanakan fungsi rujukan penanganan kasus, juga mengkoordinasikan upaya-upaya pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan, anak, dan difabel di Desa Sriharjo.

Dalam bidang keagamaan, perhatian utama Pemerintah Desa Sriharjo selama 6 (enam) tahun ke depan adalah membangun religiusitas dan toleransi. Upaya ini akan dilakukan melalui pemberdayaan kaum rois, ustad, pengembangan TPA, forum Alumni jamaah haji, penyelenggaraan pengajian bersama, fasilitasi alat ibadah Kristen protestan dan katholik serta inisiasi dan fasilitasi Forum Komunikasi antar Umat Beragama (FKUB) Desa Sriharjo.

Dalam bidang lingkungan hidup, keselamatan dan ketenteraman warga, pembangunan selama enam tahun

mendatang hendak diarahkan pada upaya-upaya menjamin warga masyarakat Desa Sriharjo selamat dari bencana alam. Desa Sriharjo merupakan desa yang rawan bencana, sehingga program-program pengurangan resiko bencana (PRB) menjadi program besar yang hendak dilakukan. Penyadaran kelestarian lingkungan hidup kepada masyarakat, penguatan kapasitas PRB dan tanggap darurat bagi warga merupakan upaya yang hendak dilakukan dalam kerangka ini.

Inisiasi dan pengembangan lumbung bencana, penyusunan peta kebencanaan/daerah rawan bencana, penyusunan kalender musim menjadi bagian penting yang akan dilakukan selama 6 tahun ke depan. Penguatan kapasitas kelembagaan PRB dari berbagai unsur (FPRB dan komunitas lainnya) menjadi bagian dari program PRB Desa Sriharjo.

Dalam hal penanganan sampah, akan dilakukan upaya-upaya tidak saja membuang sampah pada tempatnya, tetapi juga dengan gerakan pengelolaan dan pengolahan sampah. Pengelolaan dan pengolahan sampah akan dilakukan melalui mekanisme 'Bank Sampah' yang dikoordinasikan oleh BUMDes. Gerakan memilah sampah akan dimulai dari setiap rumah tangga di Desa Sriharjo. Hal ini dilakukan dalam kerangka pelestarian lingkungan, pengurangan resiko bencana, sekaligus peningkatan pendapatan keluarga.

Berkaitan dengan keamanan warga, menghidupkan pos-pos ronda siaga keamanan setiap Pedukuhan merupakan upaya yang hendak dilakukan. Regenerasi dan penguatan kapasitas linmas Desa juga menjadi bagian dari upaya menjamin keamanan

di Desa Sriharjo. Upaya mewujudkan keamanan warga ini juga hendak dilakukan dengan menjalin sinergisitas dengan aparat keamanan yang ada di Desa Sriharjo yakni babin kamtibmas dan babinsa. Selain itu, penyadaran hukum dan upaya menggalang jaringan bantuan hukum bagi warga kurang mampu menjadi bagian dari arah kebijakan pembangunan yang hendak dilakukan.

Berkaitan dengan dokumentasi dan publikasi, selama enam tahun ke depan, Pemerintah Desa hendak menyusun peta potensi, peta pembangunan dan pemberdayaan desa. Peta ini akan dibuat dalam bentuk digital, agar memudahkan orang untuk mengakses. Updating profil Desa akan dilaksanakan secara reguler. Pengembangan Sistem Informasi Desa (SID) akan juga menjadi bagian dari program besar publikasi desa ini.

Dalam upaya pelaksanaan program-program besar selama 6 tahun ke depan ini, dibutuhkan aparatur Pemerintah Desa yang mampu memfasilitasi, mendorong, dan berproses bersama dengan segenap elemen masyarakat Desa Sriharjo. Untuk itu, peningkatan kapasitas dan penguatan perspektif aparatur Pemerintah Desa beserta BPD dan juga Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) menjadi poin yang akan dilakukan selama 6 tahun ke depan. Membangun penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih, terbuka, adil, dan berpihak pada kepentingan rakyat akan dilakukan guna memenuhi prasyarat bagi terlaksananya pembangunan Desa Sriharjo selama enam tahun ke depan.

Terakhir, dalam pelaksanaan program-program yang ada, Pemerintah Desa hendak menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, seperti Perguruan Tinggi dan LSM. Berkonsultasi dan

bermitra dengan Pemerintah Supra Desa (Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, Pusat) juga menjadi bagian dari kebijakan pembangunan Desa Sriharjo selama enam tahun mendatang.

5.3 Arah Kebijakan Keuangan Desa

Penyelenggaraan keuangan desa akan ditatausakan dan ditatalaksanakan dengan memegang prinsip keterbukaan dan pertanggungjawaban public (transparansi dan akuntabilitas). Dalam hal ini, akan dilakukan perencanaan secara partisipatif, dan pelaporan secara terbuka melalui beragam media, seperti spanduk, baliho, website desa, dan lain-lain.

Dalam pengelolaan Keuangan Desa, hendak diarahkan pada upaya peningkatan sumber pendapatan sendiri, yakni Pendapatan Asli Desa (PADes), melalui pengembangan BUMDes dan optimalisasi asset desa. Dalam hal penyelenggaraan program yang membutuhkan dana besar, hendak dilakukan upaya mencadangkan anggaran dalam jangka waktu dan jumlah tertentu, sehingga ketika tiba saatnya program dilaksanakan, Desa memiliki dana yang cukup untuk melaksanakan program tersebut.

Mensinergikan program kegiatan Desa dengan program kegiatan supra Desa (Kabupaten, Provinsi, Pusat) dan bekerja sama dengan pihak ketiga (LSM, Perguruan Tinggi, Swasta), menjadi bagian dari arah kebijakan keuangan Desa Sriharjo selama enam tahun ke depan.

5.4 Program dan Kegiatan Indikatif

Terlampir

5.5 Strategi Pencapaian

Beberapa strategi yang akan diambil Pemerintah Desa Sriharjo dalam pencapaian program selama 6 tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- 1) Mendorong lahirnya organisasi/lembaga kemasyarakatan Desa sebagai pelaksana kegiatan (Dewan Olah Raga, Dewan Kebudayaan, Forum PAUD, dan lain lain)
- 2) Melakukan pembinaan serta fasilitasi penyelenggaraan kegiatan rutin dan peningkatan kapasitas lembaga-lembaga kemasyarakatan desa yang ada.
- 3) Menjalinkan sinergisitas kerja antara lembaga kemasyarakatan Desa dengan aparatur Pemerintah Desa.
- 4) Meningkatkan kapasitas dan memperkuat perspektif aparatur Pemerintah Desa dan BPD.
- 5) Menjalinkan kemitraan dan kerja sama dengan pihak luar yang tidak mengikat (Kelompok masyarakat, swasta, Perguruan Tinggi, LSM)
- 6) Mensinergikan Program Pemerintah dan Program Pemerintah Desa.
- 7) Menggalang dukungan dana dari Pemerintah Kabupaten, Provinsi, dan Pusat.

BAB VI

PENUTUP

Serangkaian tahapan proses penyusunan RPJMDesa Sriharjo 2019-2025 telah dilakukan, mulai dari pembentukan Tim RPJMDesa, Pengkajian Keadaan Desa (PKD), Musyawarah Desa, hingga Musyawarah Perencanaan Desa (Musrenbang) dan Penetapan Peraturan Desa tentang RPJMDesa 2019-2025. Proses penyusunan RPJMDesa bisa dikatakan telah dilakukan secara partisipatif, yakni melibatkan segenap unsur/elemen yang ada di masyarakat.

Tidak ada kendala signifikan yang ditemukan oleh tim RPJMDesa Sriharjo dalam proses penyusunan RPJMDesa ini. Masukan masyarakat terkait potensi, masalah, dan usulan program yang didapat dari proses PKD menjadi dasar utama dalam penyusunan program besar Pemerintah Desa Sriharjo dalam RPJMDesa 2019-2025. Program Lurah Desa saat kampanye dipadukan dengan usulan dan pengkajian oleh masyarakat, serta disinkronkan dengan program dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul menjadi Program besar Pemerintah Desa Sriharjo 2019-2025.

Harapannya, dengan proses partisipatif dan kajian mendalam serta penyusunan naskah yang serius, benar-benar dapat menjadikan dokumen RPJMDesa ini dapat digunakan sebagai acuan pelaksanaan pembangunan Desa Sriharjo selama

enam tahun mendatang. Sehingga, impian menuju Desa Sriharjo yang sejahtera, mandiri, berdaulat, dan religius dapat diraih.

